

Digital Repository Universitas Jember
**KEBIJAKAN MULTIKULTURAL DALAM
NATION BUILDING AUSTRALIA**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana Pada Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 30 SEP 2002
No. Induk :
Klass
320.994
UER
k

Oleh :

LUSTY VERANITA

NIM. 970910101241

Dosen Pembimbing :
Prof. DR. A. KHUSYAIRI, MA
NIP. 130 261 689

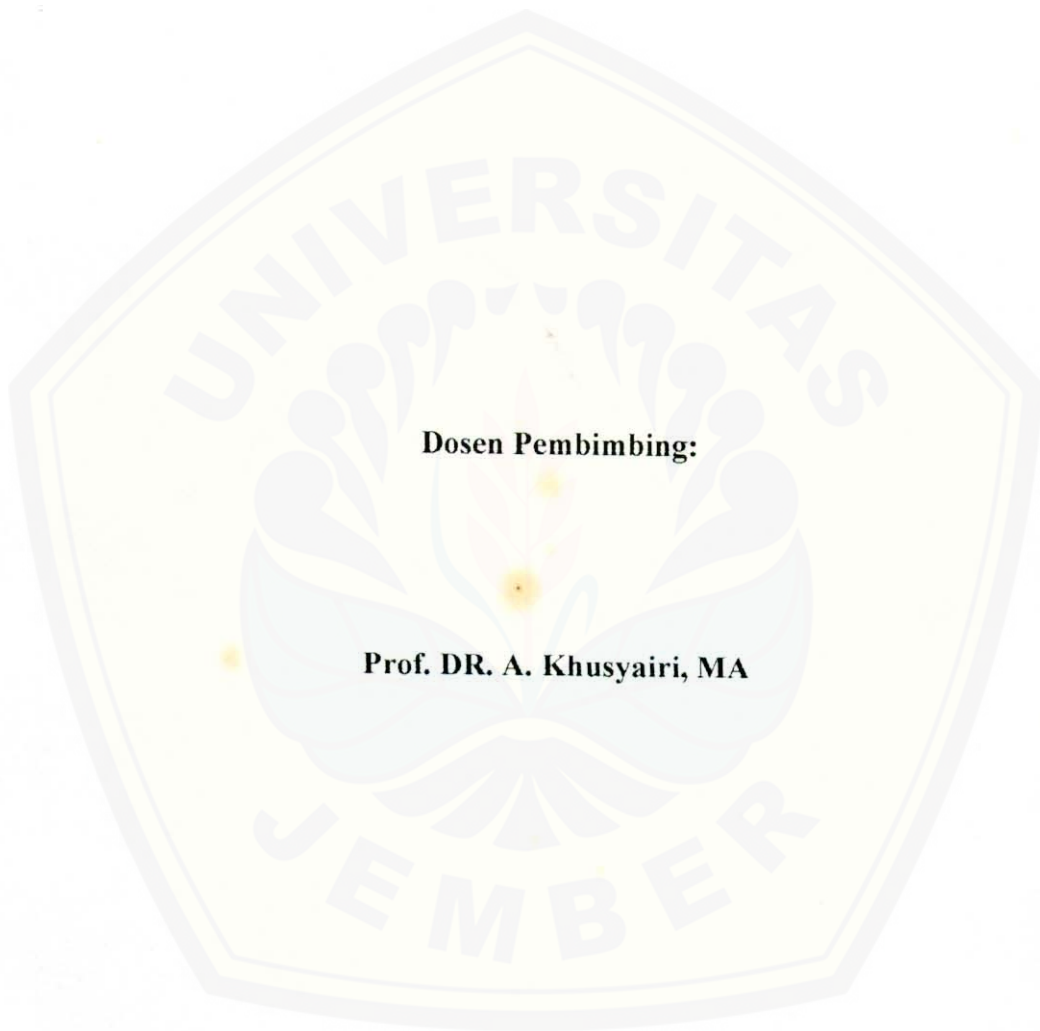
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
JUNI, 2002**

PERNYATAAN

'Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui'.



Lusty Veranita

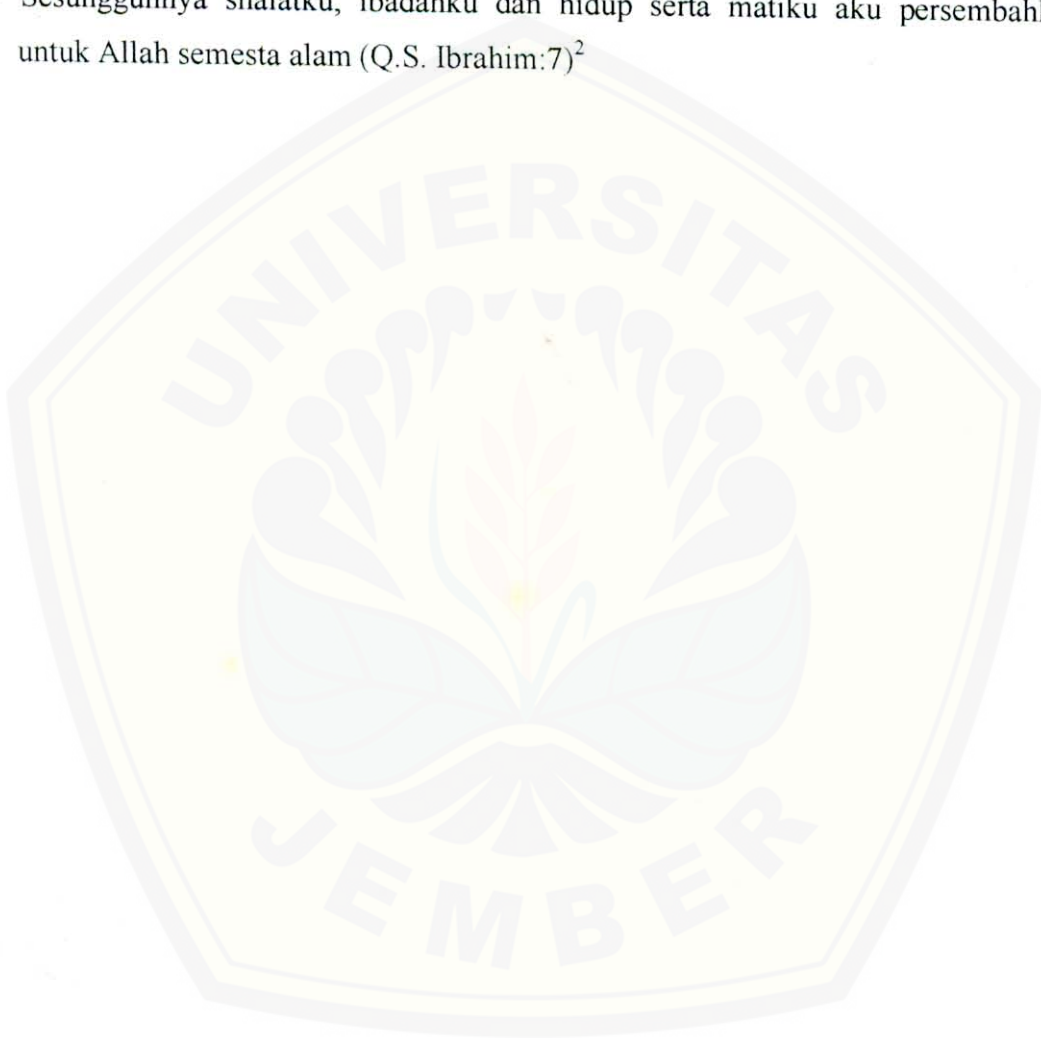


Dosen Pembimbing:

Prof. DR. A. Khusyairi, MA

MOTTO:

- ◆ Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. AL Hujuraat:18).¹
- ◆ Sesungguhnya shalatku, ibadahku dan hidup serta matiku aku persembahkan untuk Allah semesta alam (Q.S. Ibrahim:7)²



¹ Al Quran dan terjemahannya, 1994. *Q.S. Al Hujuraat:18*, Departemen Agama Republik Indonesia.
² Q.S. Ibrahim : 7, *Ibid*.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

- ☛ Ibu Endah Suwarti dan Ayah Budiana atas segala do'a, cinta, kasih sayang yang tidak terbandingkan, serta kesabaran dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis dalam mencapai keberhasilan dalam kehidupan.
- ☛ Edwin Adi Nugroho yang menjadi keceriaan, kebahagiaan, dan semangat di hari-hariku.
- ☛ Nenekku Soerasmini, cinta kasihmu selalu mengiringi langkahku.
- ☛ My wonderful friends, Umi .N, Evita, Ervin dan Ari....Friendship is source of strength.
- ☛ Almamaterku, Universitas Jember.

PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada hari : Selasa

Tanggal : 25 Juni 2002

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

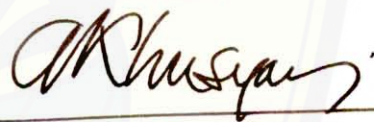
Tim Penguji

Ketua



Drs. Asrial Azis

Sekretaris

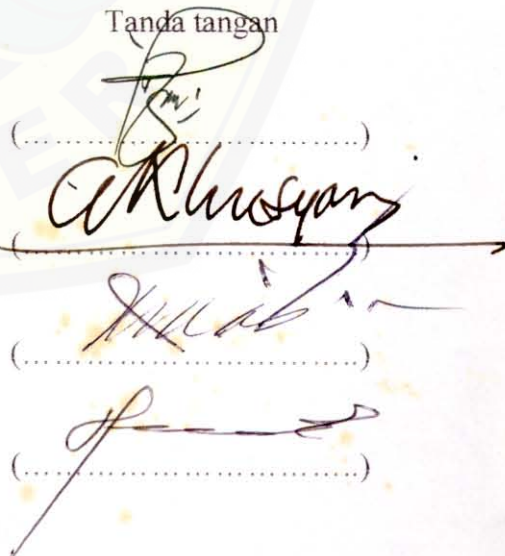


Prof. DR. A. Khusyairi, MA

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Asrial Azis
2. Prof. DR. A. Khusyairi, MA
3. Drs. Umaid Radi, MA
4. Drs. Djoko Susilo, M.Si

Tanda tangan



Mengesahkan,

Dekan

Drs. H. Mbch. Toerki

NIP. 130524832



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga Karya Ilmiah Tertulis (Skripsi) yang berjudul "**Kebijakan Multikultural dalam *Nation Building* Australia**" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya Ilmiah Tertulis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan terselesainya Karya Ilmiah Tertulis ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. DR. A. Khusyairi, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama penulisan karya ilmiah ini.
2. Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ijin serta menyetujui penulisan karya ilmiah tertulis ini.
3. Drs. Sjoekron Sjah, SU selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberi ijin serta menyetujui sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
4. Drs. Asrial Azis, selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional yang telah membantu penulis.
5. Drs. Umaidi Radi, selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan secara akademis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Drs. Djoko Susilo, M.Si dan Drs. Umaidi Radi, MA, yang telah menguji penulis sehingga penulis memperoleh predikat lulus.
7. Dosen-dosen serta seluruh staf administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

8. Ibu Endah Suwarti dan Ayah Budiana selaku orang tua penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, kasih sayang, cinta, kesabaran, serta pendidikan, dorongan yang mengiringi keberhasilan penulis.
9. Umi Nurhayati (Thanks for always be there for me), Rahma Evitasari (Thanks for the share), Ervin Sulistyawati (To have you my friend is beautiful thing in my life, thanks), Ari Wijayanti (Keep cute!), juga Enggar, Siska, Iva, O'oz, Yuni, Avi Marina, Arik, Emud, Feria, Ari, Uswatun, Lik Ni, Luki, Agung, Henik.
10. Teman yang telah banyak membantu penulis mencari data di Universitas Airlangga Surabaya yaitu Wawan, Rudi, Wahyudi dan Afif.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya secara keseluruhan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Ilmiah Tertulis ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan tulisan ini. akhirnya penulis berharap semoga Karya Ilmiah Tertulis ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	6
1.3 Permasalahan	8
1.4 Landasan Teori	8
1.5 Hipotesis	11
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	12
1.6.2 Metode Analisa Data	12
1.7 Pendekatan	12
II. GAMBARAN UMUM MULTIKULTURALISME DI AUSTRALIA..	13
2.1 Multikulturalisme di Australia	13
2.2 Keragaman Kultural di Australia	17
2.3 Konsep Multikulturalisme di Australia	24

III	NATION BUILDING DI AUSTRALIA.....	33
	3.1 Pembentukan Identitas Nasional Australia.....	35
	3.2 Kebijakan Multikultural di Australia.....	45
	3.2.1 Kebijakan Multikultural Pada Masa Pemerintahan PM. Bob Hawke	56
IV	ALASAN PEMERINTAH AUSTRALIA MEMILIH KEBIJAKAN MULTIKULTURAL	61
	4.1 Kebijakan Multikultural Terhadap Kaum Aborigin di Australia ...	70
	4.2 Keuntungan dan Kerugian dari Pelaksanaan Kebijakan Multikultural.....	81
V	KESIMPULAN	92
	DAFTAR PUSTAKA	93

RINGKASAN

Penulis mengambil judul skripsi **Kebijakan Multikultural dalam *Nation Building* Australia** dengan pertimbangan masalah tersebut sangat menarik, karena kebijakan multikultural berkaitan dengan keragaman budaya dan bangsa yang terdapat di Australia. Kebijakan multikultural sampai saat ini masih memiliki masalah-masalah yang belum tuntas sepenuhnya seperti, masalah dengan orang-orang Aborigin. Dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional penulis mengkaitkan dengan aspek-aspek politik yang terdapat di dalam pelaksanaan kebijakan multikultural tersebut. Pada bab satu penulis menguraikan mengenai latar belakang pelaksanaan kebijakan multikultural oleh pemerintah Australia. Pada bab dua tentang gambaran umum multikulturalisme di Australia, pada bab tiga mengenai *nation building* Australia yang berkaitan dengan pembentukan identitas nasional Australia dan kebijakan multikultural pada masa pemerintahan Perdana Menteri Bob Hawke. Pada bab empat penulis menguraikan alasan pemerintah Australia memilih kebijakan multikultural yang di dalamnya mencakup keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan kebijakan multikultural ini.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keragaman kultural yang terdapat di Australia mendorong pemerintah Australia untuk menerapkan suatu kebijakan agar terwujud kehidupan yang harmonis di antara warga negara Australia, kebijakan ini harus dapat merangkum keragaman etnis Australia menjadi suatu kehidupan yang harmonis. Dengan komposisi penduduk Australia yang terbanyak adalah orang-orang *Anglo-Saxon* maka pada tahun 1960-an pemerintah Australia menerapkan kebijakan asimilasi. Pemerintah Australia memilih kebijakan asimilasi juga disebabkan karena kedekatan Australia dengan *motherland*-nya yaitu Inggris, dengan kebijakan asimilasi ini pandangan Australia bahwa mereka adalah transplantasi dari Inggris, akan tetap terjaga.

Kebijakan asimilasi ini merupakan kebijakan yang menginginkan agar keragaman kultur yang beragam yang dibawa oleh para imigran ketika mereka bermigrasi ke Australia diasimilasikan dalam kultur *mainstream* yaitu kultur Inggris.¹ Kebijakan asimilasi merupakan kebijakan yang bersifat sangat Anglo-sentris. Kebijakan asimilasi Australia ini memang merupakan kebijakan yang sangat rasial, karena kebijakan ini hanya mau menerima para imigran yang memiliki kedekatan ras dengan Eropa, dalam hal ini yang dimaksud dengan orang-orang Inggris, sehingga Australia tidak menerima masuknya imigran lain seperti misalnya orang-orang Asia. Berkaitan dengan kebijakan asimilasi Stephen Castles mengungkapkan bahwa kebijakan asimilasi atau *White Australian Package* meliputi 3 komponen, yaitu Australia mendefinisikan dirinya sebagai suatu masyarakat yang homogen berdasarkan kepada nilai-nilai dan pranata Inggris, sehingga Inggris merupakan nilai-nilai dan panutan yang harus dipertahankan, Australia tidak menginginkan kemurnian sebagai bangsa Inggris terkontaminasi oleh bangsa Eropa lainnya,

¹ Diah Marsidi, Harmoni Gaya Australia, Kompas 15 September 2000.

kebijakan asimilasi menutup kemungkinan kedatangan para imigran dari Asia². Kebijakan asimilasi yang diberlakukan Australia pada waktu itu menunjukkan betapa rasismenya orang Australia, disamping itu pemberlakuan kebijakan asimilasi menunjukkan munculnya ketakutan di kalangan orang Australia bahwa *Australian Way of Life* mereka akan terancam, apalagi kedatangan orang-orang Asia yang merupakan pekerja keras membuat mereka memiliki potensi yang besar untuk memiliki posisi yang kuat di bidang ekonomi.

Terdapat unsur-unsur rasisme di dalam kebijakan asimilasi, membuat kebijakan ini mengalami kegagalan karena banyak elemen non British yang tidak bisa menerima, ketika mereka harus menanggalkan kebudayaan aslinya dan meleburkan diri ke dalam kebudayaan dan nilai-nilai Inggris. Sejalan dengan munculnya isu-isu demokrasi dan egalitarianisme yang semakin meluas di kalangan masyarakat Australia sendiri maka kebijakan asimilasi ini kelihatan begitu rasis, karena kebijakan asimilasi tidak memberikan hak yang sama kepada para imigran non British untuk mengembangkan warisan budayanya seperti yang diberikan kepada orang-orang keturunan *Anglo-Saxon*.

Kritikan terhadap kebijakan asimilasi ini pertama-tama dilontarkan oleh pergerakan yang disebut *Immigration Reform Group* yang melontarkan kritik bahwa kebijakan asimilasi merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap negara-negara yang non *Anglo-celtic*³. Dari sini menunjukkan bahwa dengan kebijakan asimilasi Australia semakin menghadapi kesulitan ketika harus menjelaskan tentang kebijakan asimilasi ini pada saat pemerintah Australia lebih banyak menjalin hubungan dengan negara-negara non *Anglo-celtic* seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kegagalan dan banyaknya kekurangan dari kebijakan asimilasi mendorong pemerintah Australia untuk menghapuskan kebijakan ini. Kemudian ketika Gough Whitlam menjadi perdana menteri Australia pada tahun 1972 ia membuat konsep multikulturalisme dan menjadikan konsep ini sebagai landasan *nation building* di

² Himawan Bayu Patriadi, *Pembangunan Identitas Politik Nasional, Kasus Australia*, Jember, Universitas Jember, 1998, hal:15.

³ Ratih Hardjono, *Suku Putihnya Asia-Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal:99.

negaranya. Konsep multikulturalisme di Australia ini merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman kultural yang terdapat di Australia. Konsep multikulturalisme ini yang kemudian menjadi dasar terbentuknya kebijakan multikultural. Kebijakan multikultural ini dianalogikan dengan konsep "Salad Bowl" yang memiliki arti bahwa tiap-tiap orang Australia boleh memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang negara asal mereka tetapi tetap dalam batasan sebagai orang Australia⁴. Disamping itu multikulturalisme juga merupakan pembentukan masyarakat melalui penghargaan serta melakukan pembekuan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada yang kemudian dileburkan ke dalam satu kesatuan nasional yaitu Australia⁵. Dengan kebijakan multikultural ini pemerintah Australia menginginkan suatu keadaan perbedaan kultural yang ada di Australia yang dibawa oleh para imigran dari negara lain dapat hidup harmonis tanpa ada pertikaian-pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan kultur.

Di dalam pelaksanaannya kebijakan multikultural memiliki beberapa keuntungan meskipun terdapat pula kerugian atau kekurangannya. Beberapa keuntungan dari diterapkannya kebijakan multikultural di Australia antara lain adalah, bahwa multikulturalisme adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada para imigran untuk mendapatkan hak yang sama seperti yang diberikan kepada orang-orang Australia yang lahir di Australia⁶. Sehingga para imigran tidak merasa bahwa mereka dibedakan dan tidak diberikan hak dan pelayanan yang sama seperti orang-orang Australia yang lahir di Australia. Disamping itu multikulturalisme oleh pemerintah Australia dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki demokrasi serta memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan penghargaan terhadap hak-hak individu⁷. Diberlakukannya kebijakan-kebijakan sebelum multikultural seperti kebijakan asimilasi

⁴ Ibid, hal:112.

⁵ Stephen Castles, et.al *dalam Budaya dan Politik Australia – Suatu Masyarakat Tanpa Bangsa*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992, hal:205.

⁶ Ratih Hardjono, op.cit, hal:112.

⁷ Multiculturalism : *A Policy Response to Diversity*, Management of Social Transformation-MOST, UNESCO.

ataupun *White Australia Policy* yang cenderung rasis memberikan konsekuensi adanya perbedaan terhadap pemberian hak kepada masing-masing individu yaitu perbedaan antara hak yang diberikan kepada orang-orang *Anglo-Saxon* dengan orang-orang non *Anglo-Saxon* misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dibanding mereka yang non *Anglo-Saxon*, oleh karena itu dengan diberlakukannya kebijakan multikultural hak masing-masing individu lebih diperhatikan, serta semakin hilangnya unsur-unsur diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan di Australia, seperti diberlakukannya kebijakan imigrasi yang non diskriminasi, pada sekitar tahun 1999-2000 kebijakan imigrasi ini mendasarkan kepada penarikan imigran karena kemampuan dan bakat yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di Australia dan bukan lagi berdasarkan ras dan warna kulit mereka. Disamping itu kebijakan multikultural telah mampu membentuk suatu kehidupan yang harmonis di Australia serta menjadi pijakan bagi pembentukan identitas nasional dan *nation building* negara tersebut.

kebijakan multikultural disamping memiliki beberapa keuntungan seperti yang telah disebutkan di atas, juga memiliki kerugian atau kekurangan di antaranya adalah, kebijakan multikultural memiliki inti bahwa untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bersatu maka diperlukan kemampuan dan kefasihan dalam berbahasa Inggris.⁸ Hal tersebut merupakan kekurangan dari kebijakan multikultural karena bagi para imigran yang berasal dari negara yang tidak berbahasa Inggris kemampuan dan kefasihan berbahasa Inggris masih merupakan suatu masalah, ketidakmampuan mereka untuk berbahasa Inggris aktif menimbulkan kesulitan untuk melakukan adaptasi dengan orang-orang Australia yang *Anglo-Saxon*, apalagi ketika mereka dihadapkan kepada hal-hal yang menuntut kemampuan dan kefasihan berbahasa Inggris, seperti pada penerimaan karyawan untuk bekerja. Kebijakan multikultural masih memiliki kekurangan ketika dihadapkan kepada keberadaan *indigenous people* yaitu kaum Aborigin.⁹ Kebijakan multikultural ini bagi kaum Aborigin dianggap belum mampu

⁸ Ratih Hardjono, Loc.cit.

⁹ Ratih Hardjono, Ibid.

menampung aspirasi mereka, karena kebijakan ini menempatkan kaum Aborigin dalam kedudukan yang sama dengan etnis lainnya di Australia. Hal seperti ini tidak diinginkan oleh kaum Aborigin karena sebagai *indigenous people* maka sudah sepatutnya apabila mereka mendapatkan hak istimewa sebab mereka menganggap diri mereka sebagai "pemilik bumi Australia", sehingga mereka menginginkan hak istimewa seperti yang diberikan oleh pemerintah Amerika dan Kanada kepada orang Indian serta pemerintah Selandia Baru kepada suku Maori.

Dari uraian tersebut nampak bahwa kebijakan multikultural masih memiliki kekurangan dengan menimbulkan kerugian bagi kaum Aborigin sebab mereka belum memperoleh hak istimewa seperti yang mereka inginkan. Kebijakan multikultural dapat dikatakan belum mampu menampung secara keseluruhan aspirasi dari seluruh orang dan warga negara Australia, seperti apa yang telah terjadi kepada kaum Aborigin.

Pada masa pemerintahan Gough Whitlam yang berasal dari Partai Buruh, kebijakan multikultural mengalami perkembangan, karena Partai Buruh merupakan partai yang mempunyai komitmen yang kuat terhadap egalitarianisme.¹⁰ Egalitarianisme berkaitan erat dengan kebijakan multikultural yang menginginkan persamaan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Australia. Menurut Whitlam dengan multikulturalisme berbagai macam kebudayaan akan memperkaya jati diri Australia yang masih dalam perkembangan menuju pembentukan identitas nasional Australia. Kebijakan multikultural ini diharapkan mampu menciptakan Australia menjadi suatu negara yang terdiri dari berbagai bangsa yang berbeda-beda, menarik karena keragaman kulturalnya namun tetap satu di dalam wadah negara Australia.

Pada masa pemerintahan Fraser multikulturalisme semakin berkembang, Fraser berasal dari Partai Liberal yang konservatif meskipun demikian Fraser tidak meninggalkan multikulturalisme ini. Terhadap multikulturalisme Fraser memiliki penekanan tertentu yaitu dalam memberikan persamaan hak antara pendatang baru dan penduduk Australia pada umumnya disamping itu Fraser

¹⁰ Michael Costello, Racial Discrimination and Self Determination, dalam *Jurnal Australian Foreign Affairs Record*, Canberra, 1988, hal:425-426.

memberikan hak kepada para imigran untuk mempertahankan kebudayaan asli mereka, tetapi dalam batasan sebagai seorang Australia. Dilanjutkan kemudian pada masa pemerintahan Bob Hawke multikulturalisme mengalami perubahan dan kemajuan besar karena pada masa pemerintahannya ada suatu tahun ketika Bob Hawke membuat perubahan terhadap perkembangan multikulturalisme, tahun tersebut adalah tahun 1987, ketika itu pemerintah mengganti *Australian Institute of Multicultural Affairs* yang berada langsung di bawah Departemen Perdana Menteri sendiri¹¹, sehingga perdana menteri mengawasi secara langsung. Hal ini merefleksikan pentingnya multikulturalisme di dalam proses politik dan sosial masyarakat Australia.

Dari uraian tersebut di atas dalam latar belakang masalah tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan multikultural di Australia, maka penulis mengambil judul "KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME DALAM NATION BUILDING AUSTRALIA".

1.2 Ruang Lingkup

Agar pembahasan dan analisis lebih terarah dan sistematis, maka diperlukan ruang lingkup pembahasan, sehingga akan menghindari kerancuan dalam pembahasan dan menghindari perluasan masalah dengan tujuan agar pembahasan menjadi lebih terfokus dan tidak menimbulkan pembahasan yang keluar dari tema yang menjadi pokok pembahasan.

1.2.1 Batasan Materi

kebijakan multikulturalisme di Australia merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia sebagai landasan *nation building* negara tersebut, kebijakan multikultural ini diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis di antara perbedaan ras dan kultur yang terdapat di Australia. Kebijakan multikultural merupakan kebijakan yang diberlakukan untuk kondisi dalam negeri Australia, untuk mewujudkan tujuan dan keinginan masyarakat Australia untuk mencapai *nation building* Australia yang berlandaskan kepada perbedaan kultural

¹¹ The Liang Gie, Ilmu Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1978, hal: 49.

sebagai suatu bentuk kekuatan untuk membangun Australia berlandaskan kepada memadukan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu identitas nasional baru bagi Australia yang benar-benar Australia dan tidak ada lagi unsur *British* yang mendominasi.

Berkaitan dengan uraian tersebut penulis memfokuskan pembahasan kepada kondisi dalam negeri Australia terutama berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan multikultural dan alasan pemerintah Australia memilih kebijakan multikultural sebagai landasan *nation building* Australia.

1.2.2 Batasan Waktu

Kebijakan multikultural sudah diterapkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam yang mulai menjadi perdana menteri pada tahun 1972. Kebijakan multikultural ini sejak tahun tersebut sampai sekarang tetap berlaku di Australia, di dalam membahas yang berkenaan dengan kebijakan multikultural penulis mempergunakan batasan waktu antara 1983 sampai dengan 1993, penulis memilih tahun tersebut karena pada kurun waktu tersebut banyak terjadi perkembangan bagi pelaksanaan kebijakan multikultural di Australia, disamping penulis juga akan membahas pelaksanaan kebijakan multikultural itu pada masa pemerintahan Bob Hawke pada kurun waktu tersebut di atas, disamping juga beberapa tahun sesudah pemerintahan Bob Hawke.

Penulis memilih batasan waktu pada masa pemerintahan Bob Hawke karena pada pemerintahan perdana menteri ini banyak perkembangan bagi kebijakan multikultural yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut pada masa-masa selanjutnya, seperti yang terjadi pada tahun 1989, ketika itu pemerintahan Australia memasukkan kebijakan multikultural ke dalam agenda nasional Australia, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia menunjukkan perhatian yang besar terhadap perkembangan serta keberhasilan tujuan dari kebijakan multikultural tersebut.

1.3 Permasalahan

Di dalam setiap analisis suatu peristiwa atau fenomena pada titik tertentu akan terbentuk pada suatu masalah. Permasalahan inilah yang nantinya memerlukan jawaban yang pada akhirnya mengarahkan penulis kepada bentuk pemecahan permasalahan di dalam sebuah pembahasan ilmiah. Berkaitan dengan masalah ini, The Liang Gie berpendapat:

"Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih mendalam, masalah hubungan dengan ilmu, ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya."¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas berkaitan dengan kebijakan multikultural dan *nation building* di Australia yang menjadi permasalahan adalah **"Mengapa kebijakan multikultural ini dipilih oleh Australia sebagai kebijakan di dalam *nation building*nya?"**

1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah pedoman untuk menganalisis permasalahan yang ada. Teori diperlukan untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga dengan kemudahan menganalisis maka dapat dilakukan pembahasan mendalam sesuai dengan permasalahan. Sehingga tidak terjadi analisis permasalahan yang berbeda dari tema dan menghindari pembahasan yang tidak terfokus.

Untuk menganalisis permasalahan yang berkenaan dengan pilihan pemerintah Australia terhadap kebijakan multikultural sebagai landasan *nation building* negaranya, penulis melakukan pembahasan dengan menggunakan teori Pembuatan Keputusan Graham T. Allison. Penulis menggunakan teori ini karena untuk menjelaskan apa yang terjadi di Australia mengenai tindakan pemerintah Australia untuk membuat suatu keputusan memilih sebuah kebijakan yang dianggap tepat untuk diterapkan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Australia.

¹² Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal:193.

Di dalam buku Mohtar Mas'ood yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional – Analogi dan Model, di dalamnya disebutkan bahwa model pembuatan keputusan Graham T. Allison ada 3, yaitu :

1. Aktor Rasional

Pembuatan keputusan merupakan akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Para pembuat keputusan digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan dan penyesuaian di dalam kebijakannya.

2. Proses Organisasi

Dalam proses organisasi pembuatan keputusan dilaksanakan dengan cara mekanik dengan melihat dan merujuk kepada keputusan yang telah dibuat pada masa lalu, pada prosedur rutin atau pada peran yang diterapkan pada unit birokrasi itu.

3. Politik Birokratik

Terdapat bentuk tawar-menawar di dalam pembuatan sebuah keputusan sehingga model politik birokratik ini memiliki unit analisis tindakan pejabat pemerintah dalam rangka menerapkan wewenang pemerintah yang bisa dirasakan oleh mereka yang ada di luarnya.

Oleh karena itu berkaitan dengan permasalahan yang ada di Australia, penulis memiliki pendapat bahwa di antara ketiga model pembuatan keputusan Graham T. Allison di atas yang paling tepat untuk menjelaskan kondisi di Australia berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan multikultural penulis memilih model ketiga yaitu model politik birokratik, penulis memilih model politik birokratik karena di Australia di dalam pengambilan keputusannya tidak berdasarkan otoritas dari perdana menteri tetapi lebih kepada suatu bentuk tawar-menawar di antara para pejabat yang berwenang, terlebih lagi Australia bukanlah merupakan negara otoriter. Di dalam pengambilan keputusannya pemerintah Australia yang berkuasa ketika itu dipimpin oleh Perdana Menteri Bob Hawke yang berasal dari Partai Buruh, di dalam pengambilan keputusannya, selalu dilakukan dengan memperhatikan pendapat dari partai-partai lain yang tidak berkuasa, sehingga pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan lebih

merupakan suatu proses yang demokratis. Pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Bob Hawke Partai Buruh mengalami masa kejayaan karena memegang tampuk kepemimpinan cukup lama yaitu antara tahun 1983-1992 dan kemudian diganti oleh Perdana Menteri Paul Keating.¹³ Partai Buruh berusaha untuk memberikan persamaan hak dan berusaha untuk menghilangkan diskriminasi di dalam usahanya untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan kebijakan multikultural. Pada masa kepemimpinan Bob Hawke ini Partai Buruh melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka melaksanakan kebijakan multikultural untuk mencapai kehidupan yang harmonis di Australia. Tindakan dari Bob Hawke antara lain adalah dengan membentuk Kantor Urusan Multikulturalisme atau *Office of Multicultural Affairs – OMA* pada tahun 1987 yang pengawasannya berada langsung di bawah Departemen Perdana Menteri sendiri.¹⁴ Disamping melakukan tindakan tersebut PM Bob Hawke juga memasukkan multikulturalisme sebagai agenda nasional Australia¹⁵, yang berarti bahwa multikulturalisme akan menjadi agenda bagi negara Australia dan bagi seluruh orang Australia, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Australia, sehingga kebijakan multikultural ini dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Australia dan mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk bersama-sama mewujudkan tujuan dari kebijakan multikultural ini.

Di dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di Australia, penulis juga memberikan beberapa konsep dari multikulturalisme itu sendiri. Konsep multikulturalisme pada dasarnya adalah mengenai hak-hak individu, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama, untuk mengekspresikan diri dan diterima sebagai orang Australia tanpa harus menanggalkan nilai-nilai budaya aslinya dan berasimilasi dengan nilai-nilai kebudayaan tertentu. Berdasarkan

¹³ Ratih Hardjono, Op,cit, hal : 110.

¹⁴ Bob Hawke, *A Multicultural Microcosm*, dalam *Jurnal Australian Foreign Affairs Record*, Canberra, 1989, hal : 330-331.

¹⁵ Pernyataan PM. John Howard dalam *Parliamentary Statement Racial Tolerance* pada *Australian Parliament's House of Representatives*, tanggal 30 Oktober 1996, 1999, Departement of Immigration and Multicultural Affairs (DIMA), Australia.

pernyataan itu, nilai-nilai kebudayaan tertentu adalah nilai-nilai dan pranata Inggris.

Konsep multikulturalisme menurut PM. Bob Hawke berarti sama dengan kesamaan untuk memperoleh kesempatan bagi semua orang di Australia apapun latar belakang mereka, ras, warna kulit maupun kepercayaan mereka terhadap suatu agama tertentu. Berdasarkan multikulturalisme semua orang mempunyai hak sama untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan identitasnya.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara suatu masalah. Dengan keberadaan hipotesis akan memberikan tujuan yang jelas terhadap penelitian. Hipotesis ini akan mendorong kepada pemilihan fakta-fakta yang relevan dan berguna bagi pembuktian hipotesis itu sendiri.

Pemerintah Australia memiliki beberapa alasan memilih kebijakan multikultural ini di antaranya adalah karena kebijakan multikultural ini mampu mengurangi munculnya diskriminasi khususnya terhadap para imigran, selain itu dengan kebijakan multikultural ini diperoleh kesamaan dalam pelayanan pemerintah baik bagi orang-orang *Anglo-saxon* maupun non *Anglo-saxon*. Secara umum pemerintah Australia memilih kebijakan multikultural ini karena kebijakan inilah yang paling cocok untuk diterapkan di Australia, karena kebijakan ini mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis di Australia dan kebijakan multikultural ini oleh pemerintah Australia dijadikan landasan *nation building* bagi negaranya.

Kebijakan multikultural mampu mengurangi unsur-unsur diskriminatif yang sering terjadi di antara orang-orang *Anglo-saxon* dan non *Anglo-saxon*, dengan pelaksanaan kebijakan multikultural ini menunjukkan bahwa Australia bukan lagi negara yang rasis yang selalu mendasarkan penilaian kepada ras dan warna kulit, serta menghilangkan kecurigaan bangsa Australia terhadap para imigran non *Anglo-saxon*, terutama orang-orang Asia. Kebijakan multikultural menumbuhkan kehidupan yang harmonis bagi warga Australia untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi pembangunan negaranya.

Kebijakan multikultural secara umum bisa dikatakan berhasil meskipun tidak sepenuhnya, karena kebijakan ini belum mampu mengakomodir keinginan dan aspirasi dari kaum Aborigin yang menginginkan suatu hak istimewa sebagai *indigenous people* yang tidak bisa mereka peroleh melalui kebijakan multikultural, karena kebijakan ini menyamakan kedudukan kaum Aborigin sama dengan etnis lainnya yaitu tanpa adanya hak istimewa.

Berkaitan dengan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah, "Pemerintah Australia memilih kebijakan multikultural untuk diterapkan di negaranya dan menjadi landasan bagi *nation building*nya karena kebijakan multikultural ini oleh pemerintah Australia dianggap sebagai kebijakan yang tepat dan cocok untuk diterapkan sejalan dengan kondisi masyarakat Australia yang heterogen".

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menulis melakukan penelitian dengan metode observasi tidak langsung yaitu melalui studi pustaka, adapun pelaksanaan studi kepustakaan ini antara lain di :

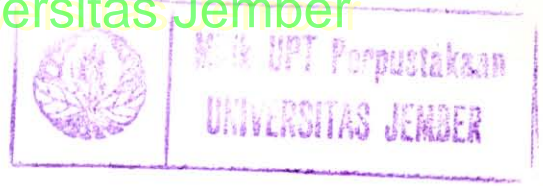
1. Tempat; Perpustakaan Pusat Universitas Jember dan Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Sumber obyek studi : buku, jurnal, laporan penelitian, koran, internet.

1.6.2 Metode Analisa Data

Yaitu dengan metode deskriptif dan eksplanatif, penulis mencoba untuk memberikan gambaran berdasarkan fakta dan menjelaskan alasan pemerintah Australia untuk menerapkan kebijakan multikultural di negaranya.

1.7 Pendekatan

Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan budaya dan historis, tanpa mengabaikan unsur-unsur politik di dalamnya dan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi. Penulis juga menekankan faktor-faktor internal yang ada di Australia yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan multikultural.



BAÛ II

GAMBARAN UMUM MULTIKULTURALISME

DI AUSTRALIA

2.1 Multikulturalisme di Australia

Multikulturalisme mengarah kepada suatu istilah untuk mengartikan bentuk kemajemukan masyarakat, di Australia kemajemukan masyarakat merupakan hal yang penting karena merupakan suatu unsur bagi pembentukan dan pemahatan jati diri bangsa Australia. Multikulturalisme di Australia juga menggambarkan perbedaan kultur dan etnis yang ada. Multikulturalisme menekankan bahwa orang Australia harus memiliki keyakinan bahwa perbedaan yang ada baik ras, budaya, etnis maupun agama merupakan suatu kekuatan positif di dalam masyarakat Australia. Perbedaan kultural yang terdapat di Australia diharapkan mampu menjadi kekuatan bangsa Australia, sehingga tidak memunculkan perselisihan oleh karena banyaknya perbedaan.

Melalui sudut pandang pemerintah multikulturalisme di Australia ini berarti adanya persamaan dan kesempatan bagi seluruh orang di Australia, semua orang Australia akan memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama maupun kepercayaan.¹⁶ Bagi pemerintah Australia, multikulturalisme merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang Australia baik yang *Anglo-saxon* maupun non *Anglo-saxon* agar mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam penggunaan fasilitas dan pemberian pelayanan pemerintah. Multikulturalisme di Australia pada intinya

¹⁶ Bob Hawke, *Multiculturalism In Australia*, dalam *Jurnal Australia Foreign Affairs Record*, Canberra, 1987, hal:49.

menekankan kepada persamaan dalam segala bidang keistimewaan yang diberikan kepada para imigran dengan multikulturalisme akan terwujud suatu kondisi adanya persamaan dan perolehan kesempatan yang sama baik bagi orang-orang *Anglo-saxon* maupun non *Anglo-saxon*.

Multikulturalisme di Australia menekankan ada kebebasan bagi semua warga Australia baik imigran maupun non imigran untuk mengembangkan warisan budaya dari leluhurnya ataupun mempergunakan bahasa asli mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Australia adalah bangsa yang dibangun oleh orang-orang yang berasal dari berbagai budaya oleh karena itu multikulturalisme yang mengacu pada kemajemukan masyarakat menekankan pada persamaan agar masing-masing ras, suku bangsa ataupun etnis yang ada di Australia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa Australia. Melalui multikulturalisme tidak ada lagi diskriminasi dan satu budaya dominan yang harus dianut oleh yang lainnya. Para imigran tidak lagi menghadapi suatu halangan apabila mereka ingin melamar pekerjaan misalnya, seringkali para imigran yang tidak berasal dari negara yang berbahasa Inggris sulit memperoleh pekerjaan di Australia, terutama untuk memperoleh pekerjaan yang setara dengan yang diperoleh mereka yang berasal dari negara-negara yang berbahasa Inggris. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Australia memberikan dana untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada para imigran yang tidak berasal dari negara yang berbahasa Inggris disamping memberikan berbagai macam kursus.¹⁷ Sehingga para imigran tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dan lebih cepat.

Multikulturalisme di Australia mengakui keberadaan berbagai ras, etnis dan suku bangsa yang berbeda-beda, mereka merupakan bagian dari Australia yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap perjalanan Australia sebagai suatu bangsa. Keragaman kultural yang ada di Australia merupakan pijakan bagi identitas nasional Australia,¹⁸

¹⁷ Bob Hawke, Australia : A Multicultural Society dalam *Jurnal Australian Foreign Affairs Record*, Canberra, 1984, hal:317.

¹⁸ *Australia in Brief 2000, A Diverse People*, dalam www.dfat.gov.au/aib2000/part-2/b/html. (on-line diakses tanggal 3 Juni 2001) hal:4.

serta merupakan kekuatan bagi Australia di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internasional. Multikulturalisme di Australia mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah, yang terus berusaha untuk menjadikan berbagai macam budaya dan banyaknya etnis yang ada di Australia sebagai kekuatan dan elemen yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara Australia.

Seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Malcolm Fraser pada pidatonya di *Australia Institute of Multicultural Affairs* tahun 1981 menyatakan bahwa multikulturalisme lebih dari sekedar toleransi yang pasif terhadap keragaman yang ada di Australia.¹⁹ Menurut Fraser multikulturalisme memberikan kepercayaan diri kepada semua kelompok etnis yang ada di Australia untuk lebih terbuka dan berinteraksi satu sama lain, dengan demikian semua orang Australia dapat belajar dan bahkan memperoleh manfaat ataupun keuntungan dari masing-masing warisan budaya, sehingga keragaman yang ada akan bermanfaat bagi semua warga Australia. Berkaitan dengan uraian di atas multikulturalisme ini juga dilaksanakan melalui pemberian pelajaran di sekolah-sekolah untuk bahasa yang dimiliki oleh para imigran seperti bahasa dari berbagai negara di Asia, salah satu contohnya adalah bahasa Indonesia yang diajarkan di beberapa sekolah di negara bagian Australia.

Multikulturalisme atau kemajemukan masyarakat Australia berkaitan erat dengan imigrasi, karena melalui imigrasilah Australia menjadi bangsa yang multikultural, dan terdiri dari berbagai macam bangsa di dunia. Multikulturalisme juga memfokuskan kepada para imigran ini, sebab inti multikulturalisme ini yaitu pengakuan keberadaan para imigran terutama mereka yang non *Anglo-saxon* sebagai warga negara Australia juga, oleh karena itu multikulturalisme menekankan persamaan hak antara para pendatang baru dan penduduk Australia pada umumnya. Multikulturalisme setidaknya telah mengurangi rasa ketakutan orang Australia terhadap "Bahaya Kuning" atau ketakutan terhadap kedatangan para imigran

¹⁹ Dr. David Penman, *Richness in Diversity*, dalam *Jurnal Australian Foreign Affairs Record*, Canberra, 1985, hal:1168.

terutama mereka yang datang dari Asia, karena ada anggapan bahwa imigran Asia dapat mengancam cara hidup orang Australia yang disebut *Australian Way of Life*. Karena orang-orang Asia tersebut merupakan pekerja keras sehingga mengancam kebiasaan orang Australia yang tidak mau bekerja pada hari Sabtu dan Minggu. Karena hari tersebut oleh mereka dianggap sebagai hari untuk bersantai setelah bekerja keras selama lima hari, tetapi bagi orang-orang Asia terutama orang Cina tidak ada hari libur untuk bekerja, sehingga orang Australia merasa bahwa kerja keras imigran Asia tersebut membuat mereka kuat secara ekonomi, dan hal seperti inilah yang ditakutkan oleh orang-orang Australia tersebut.

Kemajemukan masyarakat yang dibentuk oleh kedatangan para imigran dari berbagai negara memerlukan suatu penanganan agar keragaman kultural tersebut bukan menjadi suatu bentuk yang dapat menjadi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam masyarakat Australia, karena perbedaan yang ada di dalam masyarakat memang seringkali memunculkan suatu permasalahan-permasalahan yang tidak jarang juga menimbulkan konflik. Sehingga multikulturalisme di Australia memperhatikan keragaman yang ada agar tidak menjadi suatu potensi untuk munculnya konflik. Di Australia banyak orang yang berdatangan dari negara-negara yang sedang mengalami konflik maupun perang, tetapi di Australia kelompok-kelompok etnis tersebut dapat hidup secara berdampingan, mereka umumnya adalah para imigran yang datang dari negara-negara seperti Yugoslavia, Bosnia maupun Kroasia, atau negara-negara yang sedang mengalami konflik lainnya. Multikulturalisme di Australia merupakan upaya untuk mewujudkan bentuk kehidupan yang harmonis dan serasi antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis yang lain, sehingga keragaman yang ada justru akan memperkaya Australia.

2.2 Keragaman Kultural di Australia

Australia adalah negara yang banyak didatangi imigran dari negara-negara di dunia. Hal ini dapat dilihat bahwa 22 persen orang Australia lahir di negara lain, dan sedikitnya lebih dari seperempat orang Australia salah seorang orang tuanya lahir di luar negeri. Ada sekitar 140 lebih negara yang warga negaranya memilih Australia sebagai negara untuk menetap.²⁰ Terlihat jelas bahwa Australia adalah negara yang dibentuk oleh keberadaan para imigran.

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Juni 1997 komposisi penduduk Australia adalah sebagai berikut, yang memiliki jumlah terbesar adalah orang-orang Eropa yang tidak berasal dari Inggris sebesar 29,0%, kemudian orang-orang Inggris sebanyak 26,8%, orang Timur-Tengah dan Afrika Utara sebanyak 5,0%, negara-negara Afrika yang lain 2,8%, dari Ocenia sebanyak 9,8%, Asia Tenggara 12,0%, negara-negara Asia Timur Laut sebesar 6,8%, negara-negara di Asia Selatan 3,9%, serta dari Amerika Utara 2,0%. Apabila dilihat dari data di atas orang Inggris memiliki jumlah terbesar di urutan kedua setelah orang-orang Eropa lainnya, meskipun demikian orang-orang British ini memiliki pengaruh yang paling besar di dalam tata kehidupan di Australia, seperti di dalam bidang ekonomi, politik, sosial serta bidang-bidang lainnya. Pengaruh nilai-nilai British begitu kuat. Nilai-nilai dan tradisi sangat dominan di Australia.

Para imigran yang datang ke Australia membawa tradisi dan budaya dari negara mereka masing-masing, menimbulkan keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan bahkan kebiasaan hidup sehari-hari. Di Australia ada banyak bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di samping bahasa Inggris. Terdapat 5 bahasa yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari selain bahasa Inggris yaitu bahasa Italia, Cina, Yunani, Arab dan Vietnam.

Menurut data statistik di Australia orang-orang di sana berbicara lebih dari seratus bahasa dan hampir mencapai 200 bahasa daerah maupun bahasa suku-suku tertentu. Australia memiliki keragaman bahasa yang disebabkan oleh asal-usul warga negaranya yang heterogen.

²⁰ Australia in Brief, Loc cit.

Australia menjadi negara yang beragam secara kultural disebabkan oleh kedatangan para imigran dari berbagai penjuru dunia. Kedatangan bangsa dari berbagai belahan dunia ke Australia memiliki alasan dan motivasi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Alasan tersebut bermacam-macam mulai dari adanya konflik di negaranya sampai keinginan para imigran tersebut untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Australia. Pada awalnya Australia merupakan negara yang oleh pemerintah Inggris dijadikan tempat untuk membuang para narapidana atau yang disebut convict, Australia dijadikan tempat pembuangan narapidana oleh pemerintah Inggris karena pada waktu itu terjadi lonjakan tingkat kriminalitas di Inggris sehingga penjara-penjara di Inggris penuh, oleh karena itu diperlukan tempat untuk menempatkan para narapidana tersebut. Pada narapidana yang datang ke Australia tersebut tidak semuanya orang-orang Inggris asli, diantara mereka ada orang-orang kulit hitam, orang Jamaika, Yunani dan bahkan ada sebuah keluarga Malaysia.²¹ Sejak awal kedatangan Inggris dan narapidana dari Inggris tersebut ke Australia sudah terbentuk suatu kelompok yang terdiri dari berbagai ras, kemudian dengan berjalannya waktu maka banyak pula berdatangan para imigran lainnya, kondisi seperti inilah yang menciptakan heterogenitas masyarakat Australia.

Heterogenitas di Australia berlanjut ketika di Australia mulai ditemukan emas. Sejak ditemukan emas di Australia yang disebut dengan *Gold Rush* pada sekitar tahun 1850-an, ketika itu berita tentang ditemukannya emas di Australia telah menyebar sampai ke Inggris, sehingga banyak orang Inggris dan Irlandia yang mencoba untuk mencari penghidupan yang layak dengan mencoba untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dengan menjadi penambang emas di Australia. Sejak diketemukannya emas di Australia mulai berdatangan orang-orang Inggris yang bukan narapidana, disamping kedatangan bangsa Irlandia dan Skotlandia yang juga mencoba untuk menjadi penambang emas. Semakin berkembangnya pertambangan emas di Australia maka semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di pertambangan emas tersebut. Karena keadaan seperti itulah maka pada sekitar tahun-tahun tersebut

²¹ Ratih Hardjono. Op cit. Hal:66.

banyak didatangkan tenaga-tenaga buruh dari daratan Asia terutama dari Cina, dengan demikian keadaan penduduk Australia semakin beragam lagi.

Kedatangan orang-orang Asia ke Australia semakin menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang-orang *Anglo-saxon*, karena orang-orang Asia yang mau bekerja keras tersebut dianggap ancaman bagi kehidupan dan gaya hidup orang *Anglo-saxon*. Sampai pada akhirnya pemerintah Australia memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan Asimilasi, pada tahun 1901 di dalamnya mengadopsi kebijakan Australia Putih atau *White Australia Policy*, melalui kebijakan ini benar-benar diadakan pembatasan terhadap masuknya para imigran, dengan kebijakan ini hanya imigran yang memiliki kedekatan ras dengan Eropa saja yang boleh masuk ke Australia, peraturan ini dibuat pada intinya adalah untuk mengadakan pemilihan imigran sehingga hanya imigran *Anglo-saxon* saja terutama orang-orang Inggris yang bisa bermukim di Australia. Kebijakan ini berlaku sampai dengan sekitar tahun 1966 yang kemudian pada bulan Maret tahun itu juga kebijakan Australia Putih dihapuskan, dengan demikian pemerintah Australia mulai membuka untuk masuknya imigran yang non Eropa, sehingga kebijakan imigrasi Australia tidak lagi mendasarkan pemilihan imigran berdasarkan asal-usulnya yang pada dasarnya pemilihan para imigran tersebut hanyalah berdasarkan kepada warna kulit mereka saja. Dengan dihapuskannya kebijakan Australia Putih ini, maka semakin membuka kesempatan bagi seluruh imigran dari berbagai penjuru dunia untuk masuk ke Australia tanpa adanya kekhawatiran bahwa mereka tidak boleh masuk ke Australia karena mereka bukan orang Eropa.

Penghapusan kebijakan Australia Putih membuka peluang bagi para imigran dari Asia untuk menjadi warga negara Australia. Dengan demikian heterogenitas warga Australia semakin bertambah, bangsa Asia yang datang ke Australia diantaranya adalah orang-orang dari Cina, Vietnam, maupun dari Hongkong. Selain dari Asia berdatangan pula imigran dari negara-negara di Eropa di luar Inggris dan Irlandia yang pada pendataan yang dilakukan pada bulan Juni tahun 1997 mencapai 29,0% dari total populasi di Australia.²² Hal ini menunjukkan keadaan penduduk

²² Australia in Brief, *Non Discrimination Policy*, Opcit, hal:2.

Australia yang semakin heterogen. Beragamnya ras, etnis dan suku bangsa menyebabkan beragamnya tradisi, gaya hidup, dan bahasa. Berkaitan dengan bahasa, kedatangan orang-orang Asia yang tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris dengan fasih memunculkan permasalahan tersendiri. Hambatan bagi para imigran terutama yang datang dari negara-negara yang tidak berbahasa Inggris atau yang sering disebut dengan imigran *Non-English Speaking Background (NESB)* kebanyakan mengalami kesulitan untuk melakukan adaptasi terutama dengan orang-orang yang *Anglo-saxon* yang kebanyakan berasal dari negara yang berbahasa Inggris. Selain permasalahan komunikasi para imigran tersebut juga mengalami kesulitan di dalam hal pekerjaan, karena di Australia untuk mendapatkan pekerjaan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kefasihan berbahasa Inggris, sehingga bagi para imigran yang berasal dari Asia, Timur-Tengah maupun negara-negara lain yang tidak berbahasa Inggris mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan setara dengan apa yang diperoleh oleh orang-orang *Anglo-saxon*.

Keadaan yang seperti ini mendorong pemerintah Australia mengambil tindakan untuk membantu para imigran NESB untuk lebih memahami dan fasih berbahasa Inggris. Tindakan tersebut adalah dengan memberikan dukungan pendidikan untuk memahami bahasa Inggris antara lain melalui pelatihan, kursus bahasa Inggris kepada para imigran yang tidak fasih berbahasa Inggris, pelatihan dan kursus ini di danai oleh dana dari *Common wealth* (persemakmuran).²³ Meskipun tidak terlihat secara eksplisit untuk menjadi warga negara Australia yang baik seseorang harus fasih berbahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris secara aktif. Para imigran yang berasal dari Asia tidak memiliki banyak persamaan dalam hal ketidakmampuan di dalam berbahasa Inggris ini, karena tidak semua imigran Asia tidak fasih berbahasa Inggris. Bagi para imigran yang datang dari Vietnam, Laos kebanyakan dari mereka memang tidak fasih berbahasa Inggris, tetapi berbeda dari mereka yang datang dari Hongkong dan Taiwan, mereka rata-rata memiliki

²³ Bob Hawke, *Australia a Multicultural Society*, Op cit, hal:317.

kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Sehingga para imigran dari Asia ini memiliki karakter yang berbeda-beda.

Jumlah penduduk Australia yang sedikit, mengakibatkan munculnya imigran yang didatangkan oleh pemerintah Inggris ke Australia. Pemerintah Inggris membantu pelayaran orang Inggris untuk berimigrasi ke Australia. Bantuan imigrasi atau yang disebut *Assisted Immigration* sudah terjadi antara tahun 1830-1850, ketika itu Australia kekurangan wanita sehingga perlu mendatangkan dari Inggris. Kemudian program bantuan imigrasi ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Program bantuan imigrasi ini kemudian meluas pula meliputi orang Eropa Barat lainnya, kebanyakan pemukim yang datang adalah orang Inggris sebanyak dua pertiga, tetapi ada juga imigran dari Italia, Amerika Serikat, Yunani, Jerman, Belanda, Yugoslavia dan berbagai negara lainnya.

Tahun 1960-an Australia juga banyak menerima kedatangan pengungsi yang tidak disukai, diantaranya beberapa orang Hongaria, Cekoslawakia, Libanon dan Indocina.²⁴ Para imigran yang datang ke Australia karena adanya konflik di negara sendiri seperti orang Yugoslavia, tidak disukai keberadaannya di Australia. Konflik yang ada di negara asal mereka dikhawatirkan akan terbawa meskipun mereka telah menjadi warga Australia. Orang-orang *Anglo-saxon* tidak begitu menyukai keberadaan imigran yang datang ke Australia karena menghindari konflik di negaranya sendiri, orang *Anglo-saxon* beranggapan bahwa para imigran berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan. Di Australia pernah terjadi beberapa konflik antara para imigran Yugoslavia yaitu suku Serbia dan Croatia yang di negara asal, mereka sudah bermusuhan dan konflik ini seringkali menimbulkan keresahan bagi warga lainnya.

Keragaman kultural di Australia tidak hanya meliputi keanekaragaman ras dan suku bangsa saja, tetapi juga keanekaragaman kebiasaan, adat istiadat, agama maupun kepercayaan, masing-masing imigran yang datang ke Australia membawa agama dan kepercayaannya masing-masing seperti masuknya agama Hindu, Budha dan Islam.

²⁴ Sir Robert Gorden Menzies, *Australia: Sebuah Pengantar dalam Negara dan Bangsa: Australia* Jilid 4 Grolier Intern, Jakarta, PT. Widyadara, 1988, hal: 124.

Dengan adanya keanekaragaman tersebut pemerintah Australia berharap agar perbedaan-perbedaan akan memperkaya budaya yang ada di Australia. Pemerintah Australia memandang pentingnya mempelajari beberapa bahasa yang dimiliki oleh bangsa Asia, hal ini dapat dilihat ada 6 sekolah *Anglican* di Melbourne yang mengajarkan bahasa Indonesia disamping itu di beberapa sekolah lain juga menawarkan pengajaran bahasa Jepang dan Cina.²⁵ Sebagai contoh masuknya imigran Asia membawa tradisi-tradisi baru ke Australia. Para imigran Asia membawa tradisi yang baru dan belum pernah dimengerti oleh orang Australia seperti tradisi untuk menghormati orang yang lebih tua, dimana hal ini belum begitu dipahami oleh orang Australia yang kebanyakan dari mereka adalah orang Barat, bagi orang Asia orang yang lebih tua lebih dari sekedar orang yang umurnya bertambah menjadi tua dan harus pensiun dari pekerjaannya, di Asia orang yang lebih tua mempunyai peranan yang penting di dalam struktur keluarga. Tradisi tersebut akan memberikan nuansa baru bagi kehidupan di Australia dan dapat memperkaya keragaman yang terdapat di Australia. Meskipun seringkali keberadaan tradisi dan cara hidup dari para imigran non *Anglo-saxon* ini terabaikan, tetapi pada kenyataannya mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat Australia yang multikultural.

Para imigran yang datang ke Australia memiliki bahasa sendiri yang berbeda-beda, keragaman ini memunculkan perkembangan sarana komunikasi di Australia, contohnya pada tahun 1990 Perdana Menteri Bob Hawke mendirikan radio yang mempunyai program bahasa bagi tiap komunikasi di Australia, radio tersebut bernama *SBS Radio*.²⁶ Radio SBS ini terdapat di beberapa kota diantara Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane and Perth. Radio SBS menyiarkan berbagai acara seperti berita dan informasi bagi seluruh masyarakat Australia yang termasuk berbagai etnis di dalamnya. Dengan mendengarkan radio ini masyarakat Australia yang datang dari berbagai negara yang ada di Australia seperti orang-orang Yunani, Italia, Turki dan

²⁵ Dr. David Penman, Loc cit.

²⁶ Bob Hawke, Multicultural Australia: PM Spells Out Policies, dalam *Jurnal Australian Foreign Trade, Canberra*, 1999, hal:158-159.

Vietnam, untuk pertama kalinya selama menjadi warga negara Australia, mereka bisa mendengarkan program radio yang disiarkan dengan bahasa mereka sehari-hari. Keragaman para imigran yang datang ke Australia menimbulkan konsekuensi beragamnya bahasa yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari orang Australia. Pemerintah Australia memandang bahwa bahasa-bahasa beragam yang dimiliki oleh para imigran merupakan sumber kekayaan budaya nasional. Australia memang merupakan negara yang menjadi pilihan banyak imigran di seluruh dunia sebagai tempat tujuan.

Berkaitan dengan keragaman kultural maupun penduduk Australia, tidak lepas dari keberadaan kaum Aborigin, yang sudah menetap di Benua Australia jauh sebelum kedatangan orang-orang kulit putih (Inggris), oleh sebab itu orang Aborigin menyebut diri mereka sebagai "pemilik bumi Australia". Selama ini kaum Aborigin memang merupakan bagian dari penduduk Australia yang beranekaragam meskipun mereka seringkali terabaikan. Kaum Aborigin di Australia sejak kedatangan orang kulit putih (Inggris) di Australia banyak mengalami diskriminasi, terutama yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Sejak kedatangan orang kulit putih pula jumlah kaum Aborigin semakin berkurang. Contoh diskriminasi terhadap kaum Aborigin yang berakibat pada berkurangnya jumlah orang Aborigin, diantaranya adalah karena adanya sistem peradilan yang diskriminatif dengan menghukum kesalahan dan pelanggaran kaum Aborigin baik besar maupun kecil dengan hukuman yang berat, sehingga mendorong mereka untuk melepaskan tekanan psikologis dengan cara bunuh diri. Keberadaan kaum Aborigin sebagai *indigenous people* Australia memiliki posisi yang rumit, karena kaum Aborigin tidak bisa disamakan dengan para imigran oleh karena itu pemerintah Australia memiliki cara tersendiri untuk menghadapi kaum Aborigin.

Kaum Aborigin memberikan sumbangan yang tidak sedikit, terutama dalam seni dan benda-benda purbakala. Hasil karya kaum Aborigin ini benar-benar memberikan warna yang berbeda pada kesenian di Australia yang kontemporer. Kaum Aborigin di Australia memiliki cara hidup, tradisi, dan kebiasaan yang benar-

benar berbeda dari penduduk Australia lainnya baik yang *Anglo-saxon* maupun para imigran. Kaum Aborigin memiliki cara pandang yang berbeda dari orang Australia terutama orang-orang keturunan *Anglo-saxon*, hal ini disebabkan karena kaum Aborigin sangat percaya dengan mitos, yang diperoleh dari cerita-cerita turun-temurun dari nenek moyang mereka, mitos ini pula yang mereka jadikan dasar untuk mengukur dan mengesahkan kepemilikan tanah mereka di bumi Australia.

2.3 Konsep Multikulturalisme di Australia

Multikulturalisme di Australia mengacu kepada pengakuan terhadap keragaman budaya yang terdapat di negara tersebut, baik mengenai perbedaan agama, bahasa, adat istiadat, maupun cara hidup. Konsep multikulturalisme di Australia kelihatannya berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan berbagai perkembangan di negara tersebut.

Multikulturalisme di Australia mempunyai konsep yang berbeda dari multikulturalisme yang ada di Kanada maupun Selandia Baru. Konsep multikulturalisme di Australia memiliki ciri-ciri tersendiri. Di Kanada dan Selandia Baru, meskipun keduanya mewarisi berbagai warisan budaya dan struktur Inggris sama seperti yang terjadi di Australia, namun kedua negara tersebut tidak mengadopsi multikulturalisme sebagai sebuah kebijaksanaan menyeluruh secara nasional

Kanada dan Selandia Baru memiliki perbedaan sikap dengan pemerintah Australia dalam menghadapi keberadaan *indigenous people*, multikulturalisme di Australia belum mampu menampung apa yang menjadi keinginan *indigenous people* yaitu kaum Aborigin untuk mendapatkan hak istimewa mereka sebagai penduduk asli yang berbeda dengan para imigran, berbeda dengan yang terjadi di Kanada dan Selandia Baru sebab hak istimewa bagi Indian dan suku Maori sudah dapat terwujud.²⁷ Dari sini jelas terlihat bahwa konsep multikulturalisme di Australia mempunyai ciri khas tersendiri yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di negara tersebut.

²⁷ Multiculturalism : A Policy Response to Diversity, *ibid*.

Australia mengadopsi multikulturalisme yang mengacu kepada perbedaan budaya dan etnis ini sebagai suatu kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat Australia yang beraneka ragam. Pemerintah Australia menginginkan keanekaragaman budaya, agama, etnis dan ras yang terdapat di Australia memiliki peraturan dan pedoman yang mengaturnya sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi sebuah alasan untuk munculnya konflik dan bahkan perpecahan. Konsep multikulturalisme di Australia pada dasarnya menekankan pada penghargaan bahwa Australia memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, etnis dan budaya yang berbeda sehingga warga negara Australia secara keseluruhan harus menyadari hal tersebut agar dalam kehidupan bermasyarakatnya mereka bisa saling menghargai dan keragaman yang ada tersebut bisa menjadi sebuah kekuatan bagi Australia. Multikulturalisme di Australia berbeda dengan penerapan kebijakan *melting pot* karena di dalam kebijakan ini semua kultur kehilangan identitasnya terserap oleh kultur *mainstream*,²⁸ tidaklah demikian yang terjadi di Australia sebab multikulturalisme tidak kehilangan identitas dari masing-masing kultur, meskipun dulu Australia pernah menerapkan kebijakan yang menginginkan semua kultur lebur menjadi satu dengan kultur *mainstream* yaitu Inggris, multikulturalisme nampaknya ingin memperbaiki keadaan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Australia memang terdiri dari manusia yang beragam dalam berbagai hal.

Multikulturalisme di Australia juga menekankan terhadap penghapusan diskriminasi yang banyak terjadi di Australia, yang kebanyakan muncul karena latar belakang perbedaan yang berdasarkan ras, etnis, agama dan kultur. Diskriminasi ini muncul di berbagai bidang di masyarakat. Misalnya, yang paling dirasakan mengganggu oleh para imigran adalah diskriminasi dalam hal perolehan kesempatan kerja yang setara dan sama dengan diperoleh oleh warga negara Australia terutama yang *Anglo-saxon*. Diskriminasi di dalam hal perolehan pekerjaan ini berlaku kepada para imigran meskipun mereka memiliki keahlian dan pengalaman

²⁸ Diah Marsidi, Loc cit.

yang sama dengan orang Australia yang lahir di Australia, bagi para imigran ini meskipun keahlian, dan pengalaman mereka tidak kalah dengan orang-orang kelahiran Australia, kesempatan kerja yang mereka peroleh tetap saja sedikit. Di samping adanya diskriminasi dalam bidang perolehan pekerjaan, hampir sepertiga dari para imigran tersebut berpikir bahwa mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminatif ketika mereka ingin menyewa rumah atau *flat*, tidak jarang mereka mendapat perlakuan yang menyulitkan dan berbelit-belit.

Pada dasarnya multikulturalisme di Australia kesemuanya adalah mengenai hak-hak individu, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan memberikan kemampuan untuk mengekspresikan identitas yang dimiliki oleh masing-masing etnis, serta diterima sebagai orang Australia tanpa harus berasimilasi dengan salah satu model perilaku maupun kultur tertentu, hal inilah yang menjadi inti dari multikulturalisme di Australia. Melalui multikulturalisme Australia menginginkan setiap etnis yang ada tetap memiliki identitasnya, sehingga untuk menjadi satu bangsa Australia, setiap identitas berlainan yang dibawa oleh para imigran tidak hilang dan tidak harus melebur ke dalam satu kultur *mainstream*. Dengan multikulturalisme Australia tidak lagi menjadikan Inggris sebagai kultur *mainstream*, sehingga para imigran harus menghilangkan identitas budayanya sendiri dan melebur ke dalam budaya Inggris. Tipe multikulturalisme yang dipraktekkan di Australia sebenarnya belum bisa menghindarkan diri dari adanya unsur asimilasi.²⁹ Banyaknya komunitas etnis yang terdapat di Australia membuat antara komunitas saling berinteraksi sehingga evolusi kultural sangat diharapkan. Ketika komunitas kecil berinteraksi dengan komunitas yang lebih luas tidak dapat dihindarkan bahwa elemen-elemen budaya yang lebih umum akan mendominasi hasil dari evolusi tersebut. Sebagai contoh, ketika sekelompok kecil orang Yunani atau Italia mentranslokasikan atau mengalihkan diri mereka ke dalam lingkungan *Anglo-saxon*, tidak dapat terhindarkan

²⁹ Professor L.J.M. Cooray, *Multiculturalism in Australia*, dalam www.ourcivilisation.com/cooray/multicult/-19k (on-line), diakses tanggal 11 November 2001, hal:1.

bahwa orang-orang Yunani atau Italia tersebut akan terasimilasi ke dalam komunitas yang lebih luas yaitu komunitas *Anglo-saxon* jika bukan pada generasi pertama, pasti akan terjadi pada generasi selanjutnya. Melihat kenyataan yang demikian maka tanpa disengaja telah terjadi suatu bentuk peleburan sehingga sedikit demi sedikit komunitas etnis seperti orang Yunani atau Italia ini melebur ke dalam komunitas yang lebih luas seperti *Anglo-saxon*. Keadaan seperti ini seringkali muncul di luar perhitungan.

Multikulturalisme menekankan dukungan kepada seluruh orang Australia, termasuk mereka yang bukan berasal dari latar belakang *Anglo-celtic*. Mereka mendapat dukungan untuk berbagi keanekaragaman budaya yang mereka miliki, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara budaya yang berbeda. Multikulturalisme ingin menjelaskan bahwa bahasa, warna kulit, kepercayaan, kebiasaan berpakaian bukanlah indikasi tingkat komitmen masing-masing individu terhadap masa depan bangsa Australia. Melalui multikulturalisme ini pemerintah Australia ingin menunjukkan bahwa belum tentu seorang yang lahir di Australia mempunyai rasa peduli yang lebih besar terhadap masa depan Australia dibandingkan dengan seorang imigran yang datang ke Australia karena mempunyai keinginan yang besar untuk menjadi warga negara Australia. Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk menjadi seorang Australia adalah tidak ada hubungannya dengan penampilan luar, tidak masalah apakah dia berkulit hitam, putih, ataupun kuning asalkan dia mempunyai komitmen yang kuat untuk benar-benar menjadi warga negara Australia. Dengan multikulturalisme tidak ada lagi perbedaan bahwa mereka orang Asia, Eropa, Australia, Afrika dan sebagainya ketika mereka telah memutuskan untuk menjadi orang Australia multikulturalisme mencoba agar keragaman kultural yang ada di Australia bisa menjadi suatu kekuatan positif bagi Australia.

Konsep multikulturalisme di Australia dianggap hanya berkenaan dengan para imigran, karena multikulturalisme Australia tidak mempertimbangkan keberadaan *indigenous people* yaitu kaum Aborigin. Beberapa penekanan multikulturalisme salah satunya seperti usaha untuk menghilangkan diskriminasi hanya terfokus kepada

diskriminasi yang terjadi di kalangan pada imigran, jarang sekali yang memperhatikan ketika hal itu terjadi kepada para *indigenous people* atau kaum Aborigin. Usaha untuk menghilangkan diskriminasi terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan, menyewa rumah, pendidikan dan sebagainya selalu berada dalam lingkup antara Anglo-saxon dan para imigran yang menjadi fokus, dan kaum Aborigin hanya memperoleh sedikit perhatian. Seperti apa yang diungkapkan oleh perwakilan pada PBB Michael Costello yang menyatakan bahwa selama 200 tahun *indigenous people* Australia yaitu kaum Aborigin mengalami diskriminasi, kekejaman dan tekanan.³⁰ Kaum Aborigin ini terutama mengalami diskriminasi dalam masalah keadilan, sering mereka menjalani hukuman yang berat yang sebenarnya tidak sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Keberadaan multikulturalisme mencoba untuk menghilangkan sedikit demi sedikit diskriminasi terhadap kaum Aborigin ini, dengan multikulturalisme pemerintah Australia mencoba untuk menyamakan kedudukan kaum Aborigin dengan para imigran yang berada di sana, namun keadaan ini menjadi problematis ketika kaum Aborigin menganggap diri mereka sebagai penduduk asli Australia yang memiliki "bumi Australia", sehingga mereka tidak mau disamakan kedudukannya dengan para imigran sebab mereka berpandangan bahwa mereka seharusnya mendapatkan hak istimewa seperti yang diperoleh orang Indian di Kanada dan Amerika Serikat dan suku Maori di Selandia Baru. Kaum Aborigin sampai saat ini tetap beranggapan bahwa pelaksanaan multikulturalisme di Australia belum berhasil karena aspirasi mereka untuk mendapatkan hak istimewa belum terwujud. Untuk itulah pemerintah Australia melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan unsur-unsur diskriminasi dan perlakuan-perlakuan yang tidak sama terhadap kaum Aborigin, karena dalam konsep multikulturalisme salah satunya adalah menghilangkan unsur-unsur diskriminasi yang muncul di berbagai bidang kehidupan sosial di Australia.

³⁰ Michael Costello, Loc cit.

Konsep multikulturalisme di Australia menurut perdana menteri Bob Hawke memiliki tiga dimensi yaitu pertama berkaitan dengan identitas nasional dimana semua bangsa Australia boleh mengekspresikan warisan budayanya masing-masing tetapi harus tetap dalam batasan sebagai orang Australia, yang kedua semua masyarakat Australia memiliki hak yang sama dalam hal keadilan sosial tanpa memandang latar belakang perbedaan ras, warna kulit, agama dan bahasa, sedangkan yang ketiga upaya untuk memaksimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki masyarakat Australia terutama di dalam bidang ekonomi.³¹ Berdasarkan pernyataan perdana menteri Bob Hawke tersebut konsep multikulturalisme secara bertahap mengalami pergeseran, multikulturalisme yang pada awalnya hanya memberikan perhatian kepada terwujudnya kehidupan yang harmonis dengan berusaha untuk menyasikan kehidupan, kemudian multikulturalisme juga memfokuskan kepada masalah perekonomian. Berkaitan dengan masalah perekonomian ini, multikulturalisme ingin memaksimalkan tiap-tiap kemampuan, keahlian masyarakat Australia baik yang imigran maupun yang lahir di Australia untuk disumbangkan terhadap pembangunan ekonomi Australia. Tidak sedikit para imigran yang datang ke Australia berlatar belakang pendidikan tinggi dan membawa cukup modal ketika mereka memutuskan untuk datang ke Australia, biasanya mereka adalah para imigran yang datang dari Hongkong atau Taiwan, mereka rata-rata berpendidikan tinggi dan mempunyai cukup modal serta memiliki keahlian yang dibutuhkan di berbagai sektor ekonomi. Para imigran yang demikian diharapkan mampu memberikan sumbangan positif bagi kemajuan dan kekuatan ekonomi Australia.

Banyaknya perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat Australia seperti ras, suku bangsa, agama dan bahasa, membuat konsep multikulturalisme berkaitan erat dengan hidup dalam keharmonisan yang biasa disebut dengan *living in harmony*, hal ini merupakan unsur penting di dalam konsep multikulturalisme di Australia. *Living in harmony* sangat diperlukan di dalam multikulturalisme, sebab Australia

³¹ Ratih Hardjono, Op cit, hal: 111.

merupakan bangsa yang dibangun dari berbagai macam kultur, sehingga kehidupan yang harmonis di antara unsur-unsur budaya yang ada tersebut sangat penting demi kelangsungan pembangunan bangsa. Apabila kehidupan yang harmonis tidak dapat terwujud di Australia maka konsep multikulturalisme juga tidak bisa terlaksana dan tidak bisa dijadikan acuan di dalam membentuk konsep kehidupan sosial masyarakat Australia. Konsep multikulturalisme yang salah satunya kebebasan untuk mengekspresikan warisan budaya nenek moyang masing-masing etnis tetapi harus tetap dalam batasan sebagai orang Australia, dengan kenyataan yang demikian maka masing-masing etnis maupun kelompok bisa mengekspresikan kebiasaan, kepercayaan, dan gaya hidup di dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan berbagai perbedaan yang mungkin terjadi di antara anggota masyarakat maupun antar kelompok etnis yang ada diperlukan rasa toleransi yang besar dan komitmen dari masing-masing individu sebagai sama-sama bangsa Australia untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, sebab tanpa itu semua konsep multikulturalisme tidak akan pernah terwujud.

Toleransi rasial juga merupakan unsur penting di dalam konsep multikulturalisme, tanpa toleransi rasial akan muncul perbagai macam perselisihan, sebab begitu banyaknya perbedaan, cara pandang dan gaya hidup merupakan potensi konflik yang cukup besar untuk menimbulkan suatu perpecahan maupun perselisihan yang dapat mengancam kehidupan harmonis yang coba diwujudkan oleh masyarakat Australia. Dengan adanya toleransi dan kesadaran bahwa masyarakat Australia memang berbeda-beda dan bisa saling menghormati dan menghargai kebiasaan, adat istiadat dan gaya hidup, maka unsur-unsur diskriminasi yang muncul dalam masyarakat sedikit demi sedikit bisa dihilangkan. Toleransi rasial memungkinkan masyarakat Australia yang banyak memiliki perbedaan kultural dapat hidup berdampingan tanpa adanya rasa tidak senang dan curiga antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis yang lain. Para imigran yang berasal dari negara-negara yang tidak begitu disukai di Australia lebih dapat beradaptasi karena adanya toleransi yang cukup baik dibandingkan generasi mereka sebelumnya.

Konsep multikulturalisme nampaknya selalu berubah dari waktu ke waktu, hal ini diungkapkan oleh Phayvanh Phoumindr.³² Di dalam tulisannya mengatakan bahwa prinsip multikulturalisme yang dibuat pada tahun 1977 oleh *Australian Ethnic Affairs Council dan Australian Council on Population and Ethnic Affairs* menyatakan bahwa multikulturalisme di Australia menekankan pada keserasian sosial, identitas kultural, kesamaan dalam kesempatan dalam semua bidang kehidupan, serta persamaan tanggung jawab serta partisipasi di dalam masyarakat. Sejalan dengan perkembangannya pada tahun 1989 terdapat penambahan di dalam konsep multikulturalisme, ketika itu *Australian Government's Office of Multicultural Affairs* mendefinisikan multikulturalisme dengan elemen baru seperti memperluas penanganan identitas kultural, upaya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh wilayah di Australia, serta efisiensi ekonomi untuk bangsa Australia. Elemen baru dari multikulturalisme yang sebelumnya belum begitu mendapat perhatian adalah masalah ekonomi, berkaitan dengan permasalahan ekonomi ini multikulturalisme menginginkan agar semua orang yang telah menjadi warga negara Australia secara resmi mampu dan bersedia untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan ekonomi Australia. Inti dari penekanan di bidang ekonomi adalah untuk memaksimalkan setiap potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang Australia tanpa memandang latar belakang ras, agama, etnis dan suku bangsa.

Istilah multikulturalisme merupakan istilah yang menggambarkan keragaman kultural dan etnis di Australia pada masa sekarang. Multikulturalisme menyatakan bahwa Australia adalah negara dengan keragaman kultural dan akan selamanya begitu yaitu sebagai negara yang beragam dan Australia adalah negara yang selalu berusaha untuk yakin bahwa keragaman tersebut merupakan kekuatan yang positif bagi bangsa Australia. Keragaman yang terdapat di Australia diharapkan mampu menjadi sumber kekuatan nasional bagi negara itu. Negara dengan perbedaan dan

³² Phayvanh Phoumindr, *Multicultural Oz Lao Multiculturalism, Social Control and the Community in Australia* dalam www.global.lao.net/laostudy/multicom.htm (on-line), diakses tanggal 19 Oktober 2001.

keragaman yang begitu besar juga memiliki potensi konflik yang besar, oleh karenanya apabila keragaman tersebut tidak bisa menjadi suatu potensi positif yang dimiliki oleh Australia, maka keragaman tersebut akan menjadi suatu alasan untuk terjadinya perpecahan karena menyeleraskan berbagai macam keragaman bukanlah suatu hal yang mudah. Tercapainya keharmonisan di Australia yang multikultural merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya pembangunan bangsa Australia, karena tanpa keharmonisan tidak akan ada orang Australia, karena masing-masing etnis dan suku bangsa mengedepankan pandangan, kebiasaan dan tradisi mereka sehingga mereka, terutama para imigran yang datang dari berbagai negara tersebut lebih menonjolkan identitas negara asalnya dan bukan sebagai orang Australia. Jika para imigran tersebut tidak mempunyai kesadaran untuk menjadi orang Australia dan bukan lagi sebagai orang Asia, Eropa, maupun Amerika, maka akan muncul berbagai perselisihan yang akan menghambat kelangsungan Australia sebagai suatu bangsa.

Konsep multikulturalisme diadopsi oleh pemerintah Australia untuk memperbaiki konsep-konsep sebelumnya di dalam mengatur keragaman kultural di Australia ini. Konsep-konsep sebelumnya seperti asimilasi yang menginginkan seluruh kultur yang dibawa oleh para imigran dihilangkan dan dileburkan ke dalam nilai-nilai kultur Inggris, sehingga nilai-nilai identitas diri dari masing-masing budaya akan hilang. Kemudian setelah itu muncul kebijakan integrasi yang pada dasarnya bahwa tiap individu boleh mempertahankan tradisi kultural tetapi di luar itu dia harus menyesuaikan diri dengan kultur nasional dan institusi publik Australia. Konsep multikulturalisme mencoba untuk melakukan penambahan dan perbaikan dengan keragaman kultur yang ada tersebut, masing-masing kultur menyumbang dan saling peduli dan memberikan perhatian kepada semua kultur lain yang terdapat di Australia.



BAB III

NATION BUILDING DI AUSTRALIA

Australia merupakan bangsa yang terbentuk dari berbagai keragaman dan perbedaan yang berusaha untuk membangun bangsa tersebut dari keragaman yang ada tersebut. Gambaran secara umum dari *nation building* itu sendiri adalah suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama yang berbeda-beda yang mempunyai peran yang besar untuk pembentukan identitas nasional dan karakteristik bangsa Australia. *Nation Building* Australia berkaitan dengan pembentukan identitas nasional negara itu. *Nation building* di Australia memiliki ciri tersendiri, hal ini bermula ketika itu pada tahun 1972 Perdana Menteri Gough Whitlam diangkat sebagai pemimpin Australia, ia membuat konsep-konsep multikulturalisme dan menjadikan konsep-konsep ini sebagai landasan *nation building* negaranya. Oleh karena itu keragaman kultural yang ada di Australia merupakan modal yang penting untuk berlangsungnya *nation building*. Perdana menteri Bob Hawke mengungkapkan pandangannya bahwa imigrasi merupakan pijakan bagi *nation building* Australia³³, hal ini disebabkan karena para imigran pulalah yang membentuk Australia sebagai bangsa.

Nation Building memiliki arti sebagai suatu istilah yang mengacu kepada suatu bentuk bangunan bangsa. Bangunan bangsa dalam *nation building* merupakan suatu bangunan dari sebuah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam budaya, ras, tradisi dan agama yang berbeda-beda. Di sini sebuah bangsa dibangun oleh adanya keragaman kultural tersebut sehingga menjadi sebuah bangsa yang terbentuk dari berbagai bangsa yang pada akhirnya menjadi satu negara. *Nation Building* ini mengacu kepada apa saja yang membentuk suatu bangunan bangsa, baik itu berupa keragaman ras, suku bangsa, tradisi maupun bahasa.

Nation Building Australia menekankan kepada pentingnya imigrasi, karena dengan imigrasi ini diharapkan mampu membantu untuk menciptakan masyarakat dan perekonomian yang kuat berdasarkan kepada tempat kerja produktif, kepedulian

³³ Kim Beazly, *Nation Building: towards an Australian Population*. Dalam <http://www.unisa.edu.au/hawke/speeches/nation.htm> (on-line), diakses pada tanggal 30 September 2000.

terhadap keluarga serta lingkungan kerja yang kuat. *Nation Building* Australia berubah dari waktu ke waktu, pada awal terbentuknya negara Australia yang datang ke Australia hanya orang-orang *Anglosaxon* dari kerajaan Inggris, sehingga orang-orang inilah yang membentuk bangsa Australia pada waktu itu. Pembangunan bangsa Australia pada masa kedatangan orang-orang dari kerajaan Inggris, lebih hanya merupakan transplantasi dari berbagai norma, nilai-nilai, dan gaya hidup orang-orang Inggris yang ada di daratan Eropa, sehingga kehidupan pada waktu itu kelihatan sangat menonjol aspek *Britishness* dalam kegiatan sehari-hari.

Tahun 1940-an, ketika pemerintah Australia membuka kesempatan untuk imigrasi, maka berdatangan orang-orang Eropa lainnya dan orang-orang dari Benua Asia, kedatangan imigran ini mengubah komposisi masyarakat Australia. Keragaman dan perbedaan yang ada akibat imigrasi tersebut menjadi unsur penting dalam *nation building* Australia. Keragaman kultural ini tidak bisa diabaikan karena merupakan elemen-elemen penting di dalam pembentukan Australia sebagai suatu bangsa. Komposisi masyarakat Australia yang beragam yang terdiri dari orang-orang dari Benua Eropa baik Inggris maupun yang lainnya, ataupun dari Benua Asia, Amerika maupun Afrika, telah membentuk ciri khas tersendiri bagi bangsa Australia sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari bangsa lain.

Konsep-konsep multikulturalisme yang diaplikasikan ke dalam kebijakan multikultural merupakan landasan bagi *nation building* Australia. *Nation building* Australia yang dibentuk berdasarkan keragaman kultural memerlukan suatu kebijakan untuk mengatur agar keragaman kultural tersebut bisa menjadi unsur-unsur yang potensial dalam *nation building* Australia. Imigrasi yang menurut Perdana Menteri Bob Hawke merupakan pijakan bagi *nation building* berkaitan erat dengan kebijakan multikultural yang di dalamnya juga memfokuskan mengenai masalah imigrasi, didalam kebijakan multikultural bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi yang muncul terhadap para imigran, sehingga dengan hilangnya diskriminasi terhadap imigran merupakan *nation building* yang sekarang tengah terjadi di Australia. *Nation building* Australia mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing warga negara untuk memperkuat Australia di dalam berbagai bidang.

Nation building Australia juga berkaitan dengan keberadaan *indigenous people* Australia yaitu kaum Aborigin, sebab mereka juga merupakan salah satu unsur

dalam *nation building* Australia. Kaum Aborigin ini juga turut membangun Australia sebagai bangsa, sehingga kaum Aborigin merupakan unsur penting dalam *nation building* Australia.

Di dalam melaksanakan *nation buildingnya*, Australia memperhatikan unsur-unsur yang membentuk Australia sebagai bangsa seperti kedatangan orang-orang dari berbagai negara di belahan dunia ini, serta gaya hidup mereka, tradisi, adat istiadat maupun sistem kepercayaan mereka yang semuanya dioptimalkan untuk menciptakan bangsa Australia dengan karakteristiknya yang benar-benar Australia.

3.1 Pembentukan Identitas Nasional Australia

Australia merupakan negara yang pada awalnya mengalami krisis di dalam mengidentifikasi identitas nasionalnya. Australia pada awalnya merupakan benua kosong meskipun di sana terdapat kaum Aborigin tetapi oleh bangsa Inggris yang pertama kali menemukan benua Australia ini menyatakan bahwa benua Australia merupakan daratan tak berpenghuni. Benua Australia ditemukan oleh pelaut Inggris bernama James Cook pada tahun 1770. Benua Australia yang luas dan tidak berpenghuni memberikan ide kepada pemerintah Inggris untuk menjadikannya sebagai tempat pembuangan narapidana atau yang disebut *convict*. Pemerintah Inggris memiliki gagasan seperti itu karena pada waktu itu di Inggris terjadi peningkatan tindakan kriminal yang serius, sehingga penjara-penjara yang ada di Inggris penuh. Pemerintah Inggris pada waktu itu berpikiran bahwa mereka tidak akan mungkin membuangnya ke Amerika karena tempat di sana juga sudah penuh, oleh karena itu melihat Australia sebagai benua yang kosong pemerintah Inggris kemudian mengasingkan para *convict* atau narapidana itu ke sana. Pembuangan narapidana ke Australia ini merupakan alasan mengapa orang-orang Australia mengalami krisis identitas diri yang pada akhirnya berpengaruh kepada pembentukan identitas nasional, hal ini menyebabkan orang-orang Australia pada tahun-tahun berikutnya mengalami krisis identitas karena mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan narapidana. Benua sebagai tempat pembuangan narapidana pada waktu dahulu membuat orang-orang Australia berusaha untuk menghilangkan kenangan itu di dalam upayanya untuk membentuk identitas nasional sebagai bangsa Australia.

Pembentukan identitas nasional Australia mengalami perjalanan panjang, pada masa kedatangan para narapidana ke Australia berdatangan pula orang Inggris dan Irlandia yang bukan narapidana, namun jumlah mereka ini sedikit. Ditemukannya emas di Australia sekitar tahun 1850-an, mendatangkan imigran dari negara-negara Eropa lainnya disamping orang Inggris dan Irlandia, keberadaan emas di Australia juga mendatangkan minat orang-orang Cina untuk bekerja sebagai buruh di pertambangan emas tersebut.

Semakin banyaknya jumlah orang-orang Cina di Australia mengkhawatirkan orang-orang *Anglosaxon*, orang-orang Cina yang memiliki tradisi yang keras dan ulet dalam bekerja dianggap mampu mengancam standard hidup orang Australia. Kerja keras orang-orang Cina dikhawatirkan akan memberikan keuntungan secara ekonomis bagi mereka.

Kekhawatiran orang *Anglosaxon* semakin berkembang, sehingga pemerintah perlu menerapkan konsep Asimilasi untuk menghalangi masuknya imigran Asia terutama orang-orang Cina. Pada saat penerapan kebijakan asimilasi, di dalamnya mengadopsi *White Australia Policy* yang program imigrasinya tidak mengizinkan para imigran yang tidak memiliki kedekatan ras dengan Eropa menjadi warga negara Australia. Dalam kebijakan *White Australia Policy* yang non Eropa harus mengasimilasikan dirinya dengan nilai-nilai Inggris.

Kebijakan Australia putih atau *White Australia Policy* membuat orang Australia beranggapan bahwa mereka adalah transplantasi dari Inggris. Meskipun sebagian besar orang Australia adalah orang *British* namun sepertinya tidak ada keinginan untuk membentuk sebuah identitas nasional sendiri yang memiliki karakter Australia. Orang Australia pada waktu itu masih beranggapan mereka adalah orang Inggris yang kebetulan memiliki daratan baru untuk ditinggali, dan bukan sebagai bangsa baru yang bernama Australia.

Masyarakat Australia sepertinya tidak memperhatikan sekelilingnya yang berada di antara negara-negara Asia, orang Australia hanya memandang bahwa Inggris sebagai panutan mereka meskipun letaknya sangat jauh, seperti yang diungkapkan oleh Mr. Rawdon Dalrymple Duta Besar Australia untuk Jepang pada

pidatonya pada pertemuan kelompok Pers Nasional di Canberra menyatakan bahwa selama tahun-tahun terakhir ia bersekolah pada tahun 1947, sejarah Australia bukan mata pelajaran pilihan yang ditawarkan.³⁴ Selain itu Dalrymple mengungkapkan selama enam tahun dia bersekolah di sekolah tersebut sama sekali tidak pernah menawarkan pelajaran bahasa-bahasa Asia, dan tidak pernah diajarkan mengenai negara-negara di Asia sedikitpun baik mengenai peradaban, sejarah, letak geografis maupun literatur-literatur tentang negara Asia. Semua mata pelajaran difokuskan kepada Inggris dan Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa Australia mengidentikkan dirinya dengan unsur-unsur dan nilai-nilai *Britishness*.

Australia terus berupaya untuk mencari identitasnya, hal ini telah berlangsung dari generasi ke generasi. Pencarian identitas ini mengalami kendala yang menyolok ketika orang-orang Australia masih selalu terikat dengan tanah leluhur yaitu Inggris meskipun telah bermukim di tanah baru yaitu Australia, dan terlebih lagi mereka harus bangga dengan tanah barunya tersebut, dari sinilah awal dari pencarian identitas tersebut. Pencarian identitas ini menjadi sedikit rumit ketika masyarakat Australia baru tersebut mengalami kemiskinan budaya dan selalu mengidentifikasikan diri mereka dengan masyarakat leluhurnya yaitu Inggris. Kemiskinan budaya sangat kentara sampai dengan abad 19, sebagai contohnya para cendekiawan Australia belum berani mencantumkan bahwa ia berasal dari Australia serta karya-karyanya selalu memilih *setting* dari Inggris. Terlihat jelas bahwa pada waktu itu masih terjadi rasa malu pada orang-orang Australia untuk mengakui identitas nasionalnya sebagai orang Australia, karena mereka selalu berpandangan bahwa mereka adalah orang Inggris, meskipun Inggris sangat jauh dari Australia.

Berkenaan dengan jati dirinya Australia sampai pada awal tahun 70-an masih menekankan kepada konsep *otherness* atau keberlainan yang menekankan pada perbedaan bangsa Australia dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.³⁵ Konsep

³⁴ Mr. Rawdon Dalrymple, *Is Australia a part of Asia?*, dalam *Jurnal Australian Foreign Affairs Record*, Canberra, 1990, hal:718.

³⁵ Ratih Hardjono, *Loc cit*, hal:199.

otherness ini membuat Australia selalu berorientasi ke Barat yaitu Inggris dan Amerika. Keadaan seperti ini membuat Australia merasa bahwa dirinya adalah orang Eropa yang memiliki keterikatan yang kuat dengan Eropa, meskipun pada kenyataannya Australia tidaklah berada di tengah daratan Eropa, tetapi berada di antara negara-negara Asia. Kenyataan keberadaan Australia di antara negara-negara Asia secara bertahap mengubah orientasi Australia dari Inggris dan Amerika, bahwa Australia tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa benuanya berdekatan dengan benua Asia dan bukannya Inggris atau Amerika. Australia kemudian lebih berani di dalam menunjukkan identitasnya sebagai Australia dan bukan lagi negara yang berada di bawah pengaruh kebesaran negara Inggris. Keberanian Australia untuk lebih menunjukkan identitasnya sebagai Australia dilakukan pula karena pertimbangan bahwa saat itu Inggris dan Amerika dianggap tidak lagi memperhatikan Australia dengan sungguh-sungguh karena lebih sibuk dengan urusan di kawasannya masing-masing, sehingga Australia merasa bahwa ia tidak bisa lagi terlalu bergantung kepada Inggris dan Amerika dalam beberapa bidang tertentu. Meskipun di dalam negeri Australia sendiri banyak terdapat individu-individu yang berpendapat bahwa keterikatan dengan tanah leluhurnya yaitu Inggris merupakan hal penting yang perlu dipertahankan. Kondisi seperti inilah yang berpengaruh dalam proses pencarian identitas Australia.

Keragaman kultural yang terdapat di Australia merupakan batu pijakan bagi identitas nasional, karena identitas nasional Australia dibentuk oleh keragaman ini, identitas nasional Australia dibentuk oleh keberadaan orang-orang Asia, Eropa, Amerika dan negara-negara lainnya. Pembentukan identitas nasional Australia tidak bisa dilepaskan dari sejarah, imigrasi, dan *nation building* sebab pembentukan identitas nasional merupakan suatu proses di dalam pelaksanaan *nation building*. Di dalam pembangunan suatu bangsa identitas nasional mutlak diperlukan, dengan konsep-konsep multikulturalisme sebagai landasan *nation building* diharapkan mampu menjadi dasar di dalam pencarian identitas nasional bagi Australia. Melalui multikulturalisme para imigran yang berasal dari Asia tidak lagi mengatakan bahwa

mereka adalah orang Jepang, Indonesia, Malaysia dan sebagainya, melainkan mereka akan berkata bahwa mereka adalah orang Australia, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa identitas nasional Australia diantaranya terbentuk melalui kebanggaan mereka sebagai orang Australia. Dalam proses pembentukan identitas nasional Australia, terjadi pencampuran tradisi yang dimiliki oleh orang-orang Asia ataupun para imigran lainnya dengan Eropa ditambah dengan bercampurnya orang-orang Australia yang lahir di Australia. Mereka mencoba untuk membentuk sebuah tradisi dan kultur yang merupakan ciri yang terbentuk secara murni dari unsur-unsur budaya yang terdapat di Australia, yang berbeda dari kultur dan tradisi yang terdapat di seluruh dunia. Dengan keragaman kultural yang terdapat di Australia, Australia berusaha untuk memperoleh suatu bentuk identitas yang benar-benar murni berasal dari kreasi masyarakat Australia sendiri tanpa adanya unsur-unsur untuk meniru nilai-nilai ataupun tradisi yang memiliki pengaruh dominan di Australia yaitu pengaruh Inggris.

Nasionalisme Australia bukanlah merupakan hasil kreasi dan inisiatif dari pemerintah saja, melainkan terbentuk melalui peran dari banyak kelompok dan individu. Nasionalisme Australia merupakan hasil kreasi dari kelompok dan masing-masing individu yang bertindak untuk menciptakan Australia, kelompok ini adalah etnis, ras maupun suku bangsa sedangkan individu adalah orang-orang yang berada di dalam kelompok tersebut, tindakan masing-masing individu di Australia untuk menciptakan dan membentuk identitas nasional Australia menunjukkan kepercayaan diri dan kesiagaan nasional yang sudah saatnya untuk mencari bentuk yang paling cocok untuk menginterpretasikan identitas nasional Australia. Pencarian Australia untuk memperoleh identitas nasionalnya bukan merupakan jalan yang mudah dan harus melalui perdebatan panjang mengenai bentuk yang bagaimana identitas nasional Australia itu. Pada awalnya ketika pengaruh Inggris masih begitu kuat di Australia, identitas Australia terbentuk sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap nilai-nilai Inggris yang begitu dominan di dalam kehidupan masyarakat Australia. Perdebatan panjang mengenai identitas nasional Australia diharapkan dapat

memperoleh karakter dan nilai-nilai Australia yang lengkap dan unik dalam segi kultural maupun politis, yang berbeda dan identitas nasional di negara manapun.

Pembentukan identitas nasional Australia dipengaruhi oleh berbagai hal, pengaruh dari dalam antaranya adalah keberadaan keragaman yang ada di Australia baik dari segi etnis, ras, kepercayaan maupun tradisi, keadaan seperti ini membuat Australia harus menetapkan seperti apakah identitas nasional negaranya, karena masing-masing etnis yang ada di Australia memiliki identitas sendiri yang mereka bawa dari negara asalnya. Tanpa adanya manajemen yang baik masing-masing etnis ini akan saling menonjolkan identitasnya masing-masing sehingga Australia tidak memiliki identitas yang benar-benar menjadi karakteristik Australia, oleh karena itu, Australia menekankan pelaksanaan konsep-konsep multikulturalisme yang berintikan pada kebebasan untuk mengekspresikan diri bagi masing-masing kelompok etnis di Australia untuk menjalankan dan mengekspresikan warisan budayanya tetapi dalam batasan sebagai orang Australia, sehingga ketika mereka berada dalam lingkungan kelompok etnis mereka sendiri bebas untuk bertindak sesuai dengan tradisi aslinya, tetapi ketika sudah berada di luar dan bergaul dengan masyarakat Australia mereka akan menunjukkan identitasnya sebagai orang Australia dan bertindak seperti orang Australia tulen, meskipun pada kenyataannya mereka adalah para imigran yang datang dari negara yang jauh dari Australia.

Faktor bahasa juga berpengaruh di dalam pembentukan identitas suatu bangsa demikian pula dalam kasus Australia, bahasa merupakan faktor yang penting di dalam pembentukan identitas nasional bagi bangsa yang memiliki populasi yang heterogen ini. Komunikasi melalui bahasa dalam anggota kelompok-kelompok yang ada di Australia memungkinkan pembentukan masing-masing tingkah laku dari masing-masing individu dan memungkinkan terjadinya transmisi mengenai ide-ide tentang struktur masyarakat yang mereka bentuk. Bahasa memiliki peran penting di dalam pembentukan identitas nasional, dapat dilihat melalui pengalaman sejarah banyak negara yang mencoba untuk menciptakan rasa kebangsaan mengalami

kehancuran seperti Uni Sovyet dikarenakan oleh kondisi bangsa yang multi-etnis dan multi-bangsa, sehingga negara-negara tersebut menghadapi masalah di dalam menemukan basis baru untuk kesatuan dan keselarasan bagi bangsanya. Australia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam bahasa yaitu sekitar 100 bahasa yang ada di dunia dan hampir 200 bahasa tradisional, menganggap bahwa bahasa merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian, karena dengan memiliki dan menggunakan satu bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat Australia maka akan mempermudah komunikasi serta akan mempermudah di dalam pencarian dasar bagi pembentukan identitas nasional, sebab masyarakat Australia mempunyai bahasa yang dapat mempersatukan mereka dalam satu identitas nasional yaitu bangsa Australia.

Di samping faktor dari dalam yang berpengaruh terdapat juga faktor dari luar yang berpengaruh terhadap identitas nasional Australia. Faktor dari luar ini adalah persoalan letak geografis Australia yang berada di sekitar negara-negara Asia, dan hubungan luar negeri Australia yang semakin banyak dilakukan dengan negara-negara di Asia, membuat Australia berpikir bahwa ia tidak bisa lagi terus-menerus mengidentikkan dirinya dengan Inggris dan selalu berorientasi kepada Inggris, oleh karena itu Australia harus memiliki identitas nasionalnya sendiri.

Ketergantungan yang besar terhadap Inggris membuat Australia menjadi bangsa yang lambat di dalam menentukan karakteristik identitas nasionalnya. Meskipun Australia telah berusaha keras untuk melepaskan pengaruh Inggris di negaranya, tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, sebab banyak orang di Australia masih memiliki ketakutan untuk benar-benar terlepas dari pengaruh Inggris yang telah sekian lama menjadi panutan. Hal ini dapat dicontohkan melalui kegagalan referendum pada tahun 2000 baru-baru ini yang menginginkan Australia menjadi Republik dan lepas dari Persemakmuran (*Commonwealth*), dari kejadian ini dapat dilihat bahwa besar sekali ketergantungan Australia terhadap

Inggris baik dari segi ekonomi, manajemen ataupun politik sehingga muncul karakter yang menekankan aspek *Britishness*. Meskipun tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Inggris secara keseluruhan, namun hingga saat ini Australia berusaha untuk mencari identitas nasionalnya yang mempunyai ciri sendiri yang berbeda dengan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia.

Pembentukan identitas nasional Australia juga dipengaruhi oleh kehadiran orang Australia yang lahir dan besar di Australia. Meskipun orang-orang seperti itu sudah ada sejak kedatangan orang Inggris yang non narapidana, tetapi peran mereka belum besar pada awal-awal pembentukan bangsa Australia sebab, pada waktu tersebut orang Australia belum peduli dengan identitas nasionalnya.

Sekitar tahun 1970-an mulai muncul rasa untuk menentukan identitas nasional Australia yang benar-benar berkarakteristik Australia, disini peran mereka yang lahir dan besar di Australia karena kebanggaan yang mereka miliki sebagai orang Australia lebih baik dibandingkan orang tua mereka yang mengalami kemiskinan dalam menyatakan identitas dirinya yang mereka anggap sebagai keturunan narapidana (*convict*).

Orang-orang yang lahir dan besar di Australia pada masa akhir-akhir ini tidak melihat sendiri bagaimana masa-masa sulit pembangunan Australia sebagai negara serta kedatangan para *convict*, sehingga mereka bangga terhadap negara Australia yang saat ini sudah begitu maju. Kebanggaan seperti ini sangat dibutuhkan oleh Australia untuk membentuk identitas nasionalnya, kebanggaan yang dimiliki oleh orang-orang yang lahir di Australia bukan merupakan kebanggaan yang muncul karena pengaruh Inggris yang kuat tetapi karena Australia adalah negara yang maju.

Dilihat dari kenyataan yang ada sampai saat ini pembentukan identitas nasional Australia masih mengabaikan keberadaan Aborigin. Perayaan 200 tahun Australia pada tahun 1988 membawa kepada pengakuan jati diri bangsa Australia

menjadi lebih maju setahap lagi³⁶. Meskipun perayaan 200 tahun kedatangan pelayaran bangsa Inggris ke Australia untuk pertama kali, menimbulkan kemarahan bagi kaum Aborigin sebab perayaan tersebut sama saja dengan merayakan kedatangan bangsa kulit putih yang setelah kedatangan mereka banyak menyengsarakan kaum Aborigin.

Perayaan 200 Australia ini berbeda dengan pendapat kaum Aborigin bagi kaum kulit putih perayaan ini mempunyai makna lain yang berkaitan dengan pembentukan identitas diri dari orang-orang *Anglo-saxon* tersebut, yang selama ini merasa malu untuk mengakui asal-usul Australia sebagai pemukiman para narapidana, keadaan seperti ini terjadi sampai sekitar tahun 60-an. Makna lain dari perayaan 200 tahun Australia ini bagi orang-orang *Anglo-saxon* merupakan pertama kali secara terbuka membuka asal-usulnya yang kemudian memberikan kepercayaan dan kebanggaan kepada mereka sebagai suatu bangsa. Tetapi orang *Anglo-saxon* tersebut sama sekali tidak memperhatikan keberadaan kaum Aborigin yang juga merupakan penduduk Australia, mereka hanya memikirkan pembentukan identitas bagi diri mereka sendiri, sehingga kelihatannya identitas nasional merupakan proses yang berkaitan dengan orang-orang kulit putih saja dan tidak mengikut sertakan kaum Aborigin di dalamnya. Oleh karena itu kaum Aborigin harus menentukan sendiri identitas diri yang bagaimana yang cocok bagi mereka, karena bagi kaum *Anglo-saxon* kaum Aborigin bukanlah unsur yang memiliki peran yang besar di dalam pembentukan identitas nasional Australia.

Kebijakan multikultural sebagai dasar bagi pembentukan identitas nasional Australia bahkan belum bisa menampung aspirasi kaum Aborigin untuk mendapatkan sebuah hak istimewa sebagai *indigenous people* dan menganggap diri mereka adalah pemilik benua Australia. Sehingga kebijakan multikultural oleh kaum Aborigin dianggap hanya memfokuskan perhatiannya kepada orang-orang *Anglo-saxon* dan para imigran. Selain berkaitan dengan aspirasi mereka yang tidak tertampung melalui kebijakan multikultural, di kalangan kaum Aborigin sendiri terdapat krisis identitas

³⁶ Ibid, hal:29.

yang cukup parah, hal ini dialami oleh anak-anak campuran antara orang Aborigin dengan orang kulit putih yang biasanya disebut *mixblood*. Pada awal pembentukan Australia sebagai tempat tinggal kebanyakan orang kulit putih yang berada di sana adalah para pria, dan mereka kekurangan wanita, sehingga para pria ini banyak melakukan *mix blood* dengan wanita-wanita Aborigin kemudian anak-anak mereka inilah yang paling banyak mengalami krisis identitas. Anak-anak *mix blood* ini bingung akan identitasnya karena apabila mereka masuk ke lingkungan kaum Aborigin mereka mempunyai keturunan kulit putih, tetapi apabila memasuki lingkungan orang kulit putih sudah jelas mereka tidak mau menerima sebab secara fisik keturunan Aborigin mereka tampak jelas, krisis identitas ini semakin besar ketika mereka mengetahui bahwa kebanyakan ayah mereka yang kulit putih tidak mau mengakui sebagai anak.

Dalam upaya pencarian identitas dirinya Australia telah berusaha untuk membuat mitos-mitos yang diharapkan mampu menjadi faktor penyatu atau *unifying factor* sebagai identitas yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Mitos-mitos ini diharapkan mampu memberikan kebanggaan bagi masyarakat Australia bahwa Australia mempunyai legenda yang identik dengan ciri-ciri masyarakat Australia itu sendiri. Mitos-mitos tersebut antara lain seperti *Bushmen Legend*. Legenda ini dikaitkan dengan letak geografis yang *bush* dan *flat* sehingga memunculkan gambaran *Bush Men* adalah orang yang praktis, kasar dan siap dengan peralatannya. Legenda ini muncul pada sekitar awal tahun 1850-an.

Selain *Bushmen Legend* terdapat legenda-legenda lain yang juga sengaja diciptakan agar masyarakat Australia memiliki legenda yang punya ciri khas Australia, diantaranya adalah *Pioneer Legend* yaitu legenda yang diturunkan kepada keturunannya didasarkan pada realitas yang berkaitan dengan penaklukan tanah Australia oleh para pendatang, dengan legenda seperti *Pioneer Legend* diharapkan masyarakat Australia memiliki kebanggaan terhadap tanah Australia yang oleh para pendahulunya telah diusahakan dengan kerja keras dan penuh pengorbanan untuk menjadikannya tempat tinggal yang baik tidak hanya bagi mereka sendiri tetapi juga

untuk seluruh orang Australia, hal seperti ini pada akhirnya akan membentuk *Collective Morality* yaitu rasa kebersamaan secara moral yang erat, disamping *Pioneer Legend* terdapat juga *Ned Kelly* di dalamnya nilai yang dikembangkan adalah serupa dengan *Robin Hood* yang menjadi legenda bagi masyarakat Inggris, *Ned Kelly* diharapkan mampu menjadi tokoh kebanggaan seluruh masyarakat sehingga *Ned Kelly* muncul sebagai tokoh yang menjadi ciri khas legenda masyarakat Australia yang berbeda dari yang terdapat di negara-negara lain.

3.2 Kebijakan Multikultural di Australia

Kebijakan multikultural merupakan kebijakan yang dipilih oleh pemerintah Australia setelah Australia mengalami kegagalan di dalam menerapkan konsep asimilasi yang diaplikasikan ke dalam kebijakan Australia Putih atau *White Australian Policy* yang menginginkan para imigran yang datang ke Australia meskipun mereka non British, untuk berasimilasi ke dalam nilai-nilai British dengan meninggalkan akar kebudayaan mereka sendiri dan melebur menjadi satu ke dalam nilai-nilai budaya Inggris. Cukup jelas mengapa keberadaan kebijakan Australia Putih ini mengalami kegagalan, sebab masyarakat Australia sangat heterogen mereka tidak hanya terdiri dari orang-orang Inggris saja, sehingga merupakan hal yang sangat tidak mungkin bagi para imigran non British tersebut mau meninggalkan dan menghilangkan identitas dan nilai-nilai budaya mereka untuk berasimilasi dengan identitas dan nilai-nilai budaya Inggris. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Australia merasa perlu untuk membuat suatu kebijakan yang mampu untuk menampung semua aspirasi masyarakat Australia yang demikian heterogen, oleh karena itu kemudian dipilahlah kebijakan multikultural ini.

Pada sekitar tahun 1970-an multikulturalisme telah berevolusi menjadi kebijakan yang dominan sebagai pendekatan di dalam menangani keragaman kultural. Kebijakan multikultural di Australia memiliki tiga dimensi yaitu:

- a. Identitas budaya: hak bagi seluruh orang Australia untuk mengekspresikan dan membentuk warisan individu mereka termasuk agama dan bahasa.
- b. Efisiensi ekonomi: kebutuhan untuk menangani, membangun dan memanfaatkan secara efektif setiap keahlian dan bakat yang dimiliki oleh seluruh orang Australia, dengan mengabaikan latar belakang mereka.
- c. Keadilan sosial: hak bagi semua orang Australia untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama serta menghilangkan halangan terhadap ras, etnis, budaya, agama, bahasa, tempat lahir dan bahkan juga gender.

Kebijakan multikultural Australia dianalogikan dengan konsep *Salad Bowl* atau mangkuk salad, Australia diibaratkan sebagai mangkuknya yang di dalamnya terdapat macam-macam sayuran salad di sini yang dimaksud adalah orang-orang Australia yang heterogen terdiri berbagai ras dan etnis, kemudian sayuran ini akan tercampur menjadi satu tanpa kehilangan bentuk asli dari masing-masing sayuran tersebut namun dapat menciptakan rasa yang baru merupakan perpaduan dari semua sayuran tersebut, dan rasa tersebut bukan berasal dari salah satu unsurnya saja tetapi merupakan perpaduan dari kesemuanya. Konsep seperti inilah yang diharapkan dari kebijakan multikultural ini, dimana masing-masing memiliki kebebasan untuk berkembang tetapi tetap berada di dalam batasan sebagai orang Australia.

Pada masa jabatan Perdana Menteri Bob Hawke, di tahun 1987 Perdana Menteri ini membuat sedikit perkembangan bagi kebijakan multikultural dengan membentuk Kantor Urusan Multikulturalisme (*Office of Multicultural Affairs-OMA*) yang berada langsung di bawah Departemen Perdana Menteri itu sendiri, hal ini menunjukkan betapa pentingnya multikulturalisme bagi kehidupan sosial masyarakat Australia. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1989 Perdana Menteri Bob Hawke membuat langkah yang besar bagi perkembangan multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan nasional Australia, dengan memasukkannya ke dalam Agenda Nasional Australia. Agenda Nasional Australia ini menetapkan basis kerangka kebijakan saat ini, secara eksplisit masyarakat Australia adalah masyarakat yang beragam budayanya dan pemerintah sudah seharusnya membuat program untuk merespon

kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sejak kebijakan multikultural menjadi agenda nasional Australia pemerintah Australia banyak melakukan program untuk mendukung pelaksanaan kebijakan multikultural ini, di antaranya dengan membuat program yang bernama *The Access and Equity Strategy* untuk menjadi agen yang menangani mengenai pemberian pelayanan kepada para imigran, strategi pada program ini menyediakan diri untuk membantu, contohnya membantu para imigran yang tidak bisa berbahasa Inggris untuk lebih memahami dan beradaptasi dengan orang-orang Australia lainnya.

Kebijakan multikultural mempunyai posisi yang kuat di dalam mencegah munculnya prasangka dan pendapat yang tidak masuk akal di dalam memberikan penilaian terhadap sebuah kelompok tertentu. Sejak menjadi Agenda Nasional Australia pada tahun 1989 kebijakan multikultural yang telah mengalami perubahan dalam fokusnya yang pada mulanya berorientasi kepada para imigran menjadi lebih inklusif dengan mengalihkan fokus kepada seluruh masyarakat Australia. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan multikultural yang telah dimasukkan ke dalam Agenda Nasional diperlukan inisiatif-inisiatif khusus untuk mendukungnya di antaranya, adalah strategi untuk memperbaiki berbagai macam upaya untuk mempotensialkan kemampuan dan semua kelebihan yang dimiliki yang dimiliki oleh para imigran, berupaya agar keragaman etnis serasi dengan keselarasan sosial, memperkuat *Access and Equity Strategy* untuk mengatasi penghalang bagi para imigran yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, dan budaya serta adanya prasangka yang selama ini dialami oleh para imigran dan *indigenous people*, menetapkan pelayanan penyiaran khusus seperti radio, televisi sebagai badan usaha yang independen dan memperbaiki akses untuk pendidikan bahasa Inggris untuk para imigran.

Dengan dilaksanakannya kebijakan multikultural diskriminasi yang terjadi di Australia semakin berkurang. Melalui kebijakan multikultural program dalam keadilan sosial difokuskan kepada hak para imigran yang menghadapi halangan bahasa dan budaya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam setiap pelayanan pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan multikultural telah dilakukan sejak masa pemerintahan Gough Whitlam sebagai pencetus konsep-konsep multikulturalisme. Pada waktu pemerintahan Whitlam Menteri Imigrasinya yaitu Al Granby mengkritik pelaksanaan kebijakan asimilasi. Pada masa pemerintahan Whitlam terbentuk pula radio etnis yang bernama EA pada bulan Juni tahun 1975. Ketika pemerintahan Whitlam berganti dengan pemerintahan Fraser selama kurun waktu 1975-1983 terus berlanjut di dalam mempromosikan multikulturalisme diantaranya dengan menetapkan pelayanan penyiaran khusus atau *Special Broadcasting Service* pada tahun 1978 yang ditujukan untuk membantu agen radio EA agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, setelah itu pada tahun 1980 televisi multikultural mulai diperkenalkan. Pada waktu pemerintahan Perdana Menteri Bob Hawke di tahun pertama yaitu tahun 1983-1987 tidak ada perkembangan berarti di dalam perkembangan kebijakan multikultural, tetapi pada tahun kedua pemerintahannya yaitu di tahun 1989 Hawke memasukkan multikulturalisme ke dalam Agenda Nasional Australia, hal inilah yang membawa perkembangan besar bagi kebijakan multikultural hingga sekarang.

Sejalan dengan perkembangan berbagai hal di Australia, kebijakan multikultural di Australia banyak mengalami perubahan melalui berbagai macam fase. Perubahan ini meliputi fokus dan sasarannya, pada fase pertama yang menjadi fokus adalah para imigran yang berasal dari negara-negara yang tidak berbahasa Inggris dan fokus utamanya adalah pelayanan terhadap bahasa dan budaya yang di dalamnya menekankan bahwa perbedaan di dalam bahasa harus didukung. Untuk fase yang kedua memfokuskan kepada penanganan terhadap ketidakadilan dan kerugian-kerugian yang terjadi kepada para imigran dalam kehidupan dan terutama di dalam hubungan masyarakat dengan adanya rasisme.

Memasukkan kebijakan multikultural ke dalam Agenda Nasional Australia bagi pemerintah Australia hal tersebut merupakan agenda yang lebih luas untuk mempromosikan keadilan sosial dan meyakinkan bahwa semua penduduk Australia memiliki akses yang sama terhadap program pemerintah serta memberikan pelayanan

yang sama kepada kelompok-kelompok yang dirugikan oleh adanya diskriminasi, termasuk diantaranya kaum Aborigin dan Torres Strait Islander, orang-orang cacat, kaum wanita serta orang-orang yang berasal dari negara-negara yang tidak berbahasa Inggris. Program imigrasi yang sudah dilakukan oleh Australia sejak sebelum multikulturalisme, ketika multikulturalisme telah menjadi kebijakan bagi seluruh masyarakat maka program imigrasi pemerintah mengalami perubahan fokus yang dulunya kelihatan rasis karena hanya menerima imigran yang mempunyai kedekatan ras Eropa saja, hal tersebut telah berubah menjadi sebuah program imigrasi yang non diskriminatif dan global. Proses seleksi yang dijalani oleh para imigran adalah sama tanpa membeda-bedakan asal-usul mereka, tanpa menjadikan ras, kebangsaan, warna kulit, keturunan, etnis, jenis kelamin dan agama sebagai dasar pertimbangan di dalam menyeleksi para imigran yang akan masuk ke Australia. Program imigrasi di bawah kebijakan multikultural telah mampu mengurangi diskriminasi yang ditimbulkan akibat perbedaan latar belakang dan bahasa telah dapat berkurang, misalnya saja para imigran tidak lagi mengalami halangan yang berarti di dalam mencari pekerjaan, yang dulu sering dialami oleh para imigran yang berasal dari negara-negara yang tidak berasal dari negara yang berbahasa Inggris.

Kebijakan multikultural Australia menyeimbangkan antara hak dan kewajiban bagi seluruh orang Australia. Hak tersebut adalah untuk mengekspresikan dan berbagi warisan budayanya serta kepercayaannya, untuk menerima perlakuan dan kesempatan yang sama serta membangun dan memanfaatkan keahlian dan bakat mereka, sedangkan kewajibannya adalah mempunyai komitmen terhadap Australia dan institusi-institusi serta nilai-nilai yang demokratis di Australia serta para imigran berkewajiban untuk menghormati hak para imigran ataupun penduduk Australia yang lain untuk mengekspresikan budaya dan kepercayaan mereka. Keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban memang diperlukan di dalam pelaksanaan kebijakan multikultural, sebab tanpa keseimbangan tersebut orang-orang Australia yang berasal dari negara-negara lain akan mengekspresikan warisan budaya mereka dengan seluas-luasnya, yang terkadang hal tersebut bisa menimbulkan masalah

pahaman yang dapat memicu perselisihan. Seperti yang terjadi disebuah taksi yang sopirnya seorang kulit putih yang mengeluh tentang orang-orang etnik tertentu yang menjalankan kultur mereka tanpa memperdulikan kultur yang berlaku di Australia, dan sopir kulit putih tersebut mengatakan bahwa dia tidak menyukainya³⁷. Contoh tersebut menunjukkan bahwa ada ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban di mana etnis tertentu tersebut menjalankan adat istiadatnya tanpa memperhatikan bahwa mereka seharusnya bertindak sebagai orang Australia ketika berada di luar kelompok etnis mereka. Kejadian pada contoh di atas bisa saja menimbulkan sebuah perselisihan yang lebih dari sekedar rasa tidak suka. Kebebasan yang diberikan multikulturalisme bukanlah kebebasan tanpa batas yang kemudian bisa disalahgunakan. Kebebasan yang disalah gunakan misalnya membawa konflik yang ada di negara para imigran tersebut ke Australia, seperti yang terjadi pada etnis Serbia dan Bosnia.

Para imigran yang datang ke Australia sebagian dari mereka mengalami konflik di negara mereka sendiri, kebebasan yang diberikan oleh multikulturalisme sering disalah artikan dengan kebebasan untuk melakukan apa saja seperti di negara asalnya meskipun mereka sudah berada di Australia. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang *Anglo-saxon* sehingga mereka memiliki rasa tidak senang terhadap etnis-etnis tertentu yang seringkali bertikai dan berselisih, rasa tidak senang seperti ini merupakan timbulnya akar-akar dari diskriminasi.

Inovasi penting dalam kebijakan multikultural berkaitan dengan efisiensi ekonomi. Di dalam efisiensi ekonomi terdapat produktivitas ekonomi yang di dalamnya termasuk memanfaatkan keahlian kultural mereka dan bakat dari seluruh orang Australia yang berasal dari latar belakang kultural yang berbeda untuk memperluas perekonomian Australia baik lokal maupun internasional. Memanfaatkan keuntungan secara ekonomis sebagai basis untuk mencapai legitimasi dan penerimaan secara rasional oleh masyarakat Australia terhadap multikulturalisme, merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah Australia.

³⁷ Diah Marsidi, Loc. cit.

Fokus terhadap ekonomi ini agar para imigran baik dari negara yang berbahasa Inggris maupun bukan (*non English Speaking Background*) dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan keahlian dan bakat yang mereka miliki bagi pembangunan perekonomian di Australia. Efisiensi ekonomi di dalam kebijakan multikultural memfokuskan kepada kerugian yang sering dialami oleh banyak imigran di tempat kerja. Kerugian-kerugian ini berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para imigran yang mengalami halangan kultural dan bahasa pada saat mereka mencari pekerjaan. Kerugian yang dihadapi oleh para imigran biasanya mengenai ketidak mampuan imigran tersebut untuk berbahasa Inggris, para imigran yang tidak fasih berbahasa Inggris seringkali tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang setara dengan yang diperoleh orang-orang *Anglo-saxon*, kebijakan multikultural berusaha mengatasi keadaan ini dengan bantuan dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk memperluas dan memperbaiki kelas-kelas atau kursus-kursus bahasa yang berkaitan dengan dunia kerja bagi para imigran *non English Background* di tempat kerja mereka.

Australia memanfaatkan keragaman kultural dan sebagai potensi yang dapat menguntungkan Australia di dalam bidang ekonomi. Australia menganggap keragaman kultural dan bahasa sebagai kekuatan perekonomian sebab di Australia banyak terdapat orang-orang bisnis dari seluruh dunia, sehingga pengetahuan dan keahlian mereka tentang negara asalnya dapat membantu Australia di dalam menghadapi tantangan pasar global. Di Australia banyak terdapat pengusaha-pengusaha dari negara-negara di Asia yang datang ke Australia dengan pendidikan tinggi dan keahlian seperti pengusaha dari Hongkong dan Taiwan yang dapat membantu Australia di dalam menjalin hubungan perekonomian dengan negara-negara di Asia tersebut.

Kebijakan multikultural berupaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi para imigran di dalam bidang pelayanan seperti pemberian pelayanan yang baik bagi para imigran di dalam mencari maupun menyewai tempat tinggal, biasanya mereka mengalami diskriminasi karena ketidak mampuan di dalam berbahasa Inggris, ataupun karena perbedaan warna kulit mereka. Seringkali diskriminasi sosial ini

muncul karena adanya prasangka negatif terhadap suatu kelompok tertentu yang kadang-kadang tanpa alasan.

Kebijakan multikultural dapat mengurangi prasangka-prasangka di kalangan orang-orang Australia putih terhadap para imigran. Melalui kebijakan multikultural orang Australia putih memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap keadaan para imigran Asia yang dahulu dianggap sebagai ancaman yang paling besar bagi Australia. Orang-orang Australia pada masa awal kedatangan bangsa Asia terutama orang-orang Cina membawa kekhawatiran mendalam bagi mereka, bahkan sampai muncul istilah *Yellow Peril* atau Bahaya Kuning. Ketakutan orang Australia *Anglo-saxon* kepada orang-orang Cina ini karena kemauan mereka untuk bekerja keras tanpa mengenal lelah, hal ini mengkhawatirkan orang Australia, sebab mereka akan takut tersaingi secara ekonomi.

Di dalam menghadapi keberadaan imigran Asia ini kebijakan multikultural yang menekankan keragaman kultural sebagai potensi positif bagi Australia dapat mengubah pandangan orang-orang Australia terutama yang kulit putih terhadap imigran Asia, terbukti dengan banyak gaya hidup orang Asia yang diterima oleh masyarakat Australia sebagai pilihan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti kelas meditasi dan yoga, taekwon do, karate dan akupunktur. Semua jenis-jenis kegiatan tersebut adalah tradisi maupun seni yang berasal dari negara-negara Asia seperti India, Cina maupun Jepang. Orang-orang Australia nampaknya sudah bisa menerima pengaruh dari Asia sebagai sesuatu yang pantas dicoba dan dipelajari, dan bukan lagi sebagai suatu bentuk kegiatan yang pantas dicurigai.

Bagi Australia orang-orang Asia merupakan imigran yang berada dalam kelompok yang tidak disukai keberadaannya, namun keadaan seperti itu melalui kebijakan multikultural dapat dihilangkan sedikit demi sedikit. Orang Australia yang *Anglo-saxon* telah mempunyai pandangan yang lebih terbuka terhadap orang-orang Asia ini.

Di dalam kebijakan multikultural Australia berupaya untuk menjadikan kebijakan ini sebagai basis *nation building* Australia. Di dalam *nation buildingnya*

Australia merupakan bangsa yang dibangun dari keragaman kultural yang terdapat di Australia dan kebijakan multikultural merupakan manajemen untuk menyikapi keberadaan keragaman tersebut, agar keragaman itu bisa menjadi kekuatan positif bagi pembangunan bangsa Australia.

Kebijakan multikultural berhasil memaksimalkan potensi yang beragam yang dimiliki oleh masyarakat Australia. Masing-masing potensi yang dimiliki oleh masyarakat Australia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga masing-masing etnis di Australia mempunyai kesempatan yang sama untuk menyumbangkan kemampuan dan bakatnya bagi kemajuan Australia di berbagai bidang. Misalnya bakat dan kemampuan dari seluruh potensi masyarakat Australia disumbangkan dalam bidang olah raga. Olah ragawan-olah ragawan Australia banyak yang bukan native born atau orang-orang yang lahir di Australia bahkan terdapat juga olah ragawan yang seorang Aborigin. Beberapa diantara mereka adalah Cathy Freeman pemenang medali emas pada kejuaraan atletik dunia di Athena adalah seorang Aborigin, Tanya Van Heer lahir di Srilanka pemenang medali emas tim reli wanita tingkat *Commonwealth*, dan beberapa pemain rugby Australia seperti George Gregan yang lahir di Zambia³⁸. Melalui contoh tersebut terlibat bahwa masyarakat etnis tersebut memberikan peranan yang besar bagi kemajuan Australia di dalam bidangnya masing-masing. Olahraga memiliki kepentingan yang khusus di dalam kultur masyarakat Australia, selain itu contoh-contoh kehebatan yang diperoleh dari keragaman Australia juga banyak ditemukan dalam bidang-bidang seperti perdagangan, industri, akademis, profesi maupun seni.

Kebijakan multikultural banyak difokuskan kepada para imigran, mengenai bagaimana membantu para imigran tersebut untuk beradaptasi dengan masyarakat Australia lainnya melalui pemberian pelatihan-pelatihan bahasa Inggris. Komunikasi merupakan sarana untuk mempercepat proses adaptasi.

³⁸ Australia in Brief, ibid

Dalam pelaksanaan kebijakan multikultural pemerintah Australia membentuk badan-badan yang membantu dan dapat mendukung pelaksanaan program-program dalam kebijakan ini. Dibentuklah *National Multicultural Advisory Council (NMAC)* yang kemudian diganti dengan *Council for Multicultural Australia (CMA)*. 17 Anggota baru dari anggota dewan ini berasal adalah orang-orang yang dapat diandalkan dan dapat diterima oleh masyarakat serta memiliki komitmen yang kuat terhadap multikulturalisme ke 17 anggota CMA merupakan wakil dari seluruh negara bagian dan berangkat dari aneka ragam ras dan etnis.

CMA mempunyai peranan yang penting yaitu mempromosikan hubungan dan keharmonisan dalam masyarakat dengan mendasarkan pada kesadaran masyarakat dan pengertian adanya keuntungan secara sosial dan ekonomis yang diperoleh dari keragaman kultural tersebut. CMA ingin menekankan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari keragaman tersebut.

Kebijakan multikultural berusaha untuk menghilangkan unsur-unsur diskriminasi yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Australia. Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi di dalamnya harus terlepas dari unsur-unsur diskriminasi. Terdapatnya unsur-unsur diskriminasi akan membawa kerugian bagi para imigran, rasa ketakutan selain itu imigran ini menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam memperoleh pelayanan lembaga-lembaga maupun institusi-institusi pemerintah di dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan multikultural oleh pemerintah Australia dijadikan kebijakan menyeluruh bagi orang-orang Australia, agar semua orang Australia bisa mengekspresikan diri dan merasa nyaman menjadi orang Australia. Sebagai orang Australia tidak penting dimana anda lahir ataupun berapa lama keluarga anda di Australia, atau apakah warna kulit, kepercayaan atau ras anda, yang paling penting adalah komitmen anda terhadap Australia³⁹. Kebijakan multikultural menekankan

³⁹ Pidato Perdana Menteri Bob Hawke pada peluncuran buklet *Diversity Is Great Mate*, di North Perth, pada tanggal 16 Juli 1989, dalam *Australian Foreign Affairs Record* 1989, Department of Foreign Affairs, Canberra, Australia.

bahwa ras, warna kulit dan kepercayaan bukanlah indikasi sebagai benar-benar orang Australia, bahwa dia benar-benar mempunyai komitmen yang besar untuk memaksimalkan kemampuan dan bakatnya demi kemajuan Australia. Yang membedakan banyak orang yang datang ke Australia untuk membangun kehidupan baru di Australia adalah kualitas dari komitmen mereka. Oleh karena itu kebijakan multikultural mengakui keberadaan masyarakat Australia yang berbeda-beda.

Bagi kaum Aborigin kebijakan multikultural belum mencapai keberhasilannya karena kebijakan ini hanya terfokus pada keberadaan para imigran saja. Kaum Aborigin merasa curiga dengan kebijakan multikultural ini sebab mereka berpikiran bahwa kebijakan ini hanya alat yang digunakan oleh orang-orang kulit putih untuk menekan mereka saja. Ada beberapa argumen mengapa orang Aborigin menolak kebijakan multikultural, orang Aborigin selalu menaruh curiga terhadap setiap kebijakan pemerintah sebab mereka mengalami banyak pengalaman buruk dan penindasan sejak kedatangan orang-orang kulit putih ke Australia seperti hilangnya tanah ulayat yang mereka miliki. Alasan lain adalah sesuatu yang bersifat fundamental karena multikultural akan menempatkan orang Aborigin sama dengan etnis-etnis lain, hal ini tidak diinginkan oleh Aborigin oleh sebab mereka menginginkan posisi sebagai *Indigenous People* (penduduk asli) dengan anggapan mereka akan mendapatkan hak istimewa seperti yang diperoleh suku Maori di Selandia Baru dan Indian di Amerika Serikat dan Kanada, orang-orang Aborigin menghendaki adanya konsep bikultural.

Bagi orang Aborigin kebijakan multikultural belum mampu menyentuh eksistensi dan aspirasi mereka. Orang Aborigin merasa bahwa kebijakan multikultural tidak menguntungkan mereka sama sekali.

Kebijakan multikultural tetap belum mampu mengatasi berbagai macam bentuk rasisme terhadap orang Aborigin ini. Dibanding masyarakat Australia lainnya orang Aborigin lebih banyak menderita penyakit, tingginya tingkat pengangguran dan banyak dari mereka yang dipenjara. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh seorang tokoh asli Aborigin yang cukup disegani oleh mereka yaitu Michael Mansell

yang mengatakan bahwa di Australia orang putih adalah yang pertama dan orang hitam yang kedua⁴⁰. Masalah dengan Aborigin ini nampaknya akan menjadi masalah yang membutuhkan penyelesaian panjang, sebab di dalam masyarakat yang amat maju seperti Australia, sebagian besar Aborigin hidup dengan kondisi dunia ketiga yang amat menyedihkan.

Kebijakan multikultural untuk menjadi landasan *nation building* Australia mengalami tantangan yang tidak mudah. Selama permasalahan yang berkaitan dengan orang Aborigin ini belum tercapai penyelesaian maupun kesepakatan bagaimana mereka akan hidup berdampingan maka masih sulit bagi kebijakan multikultural untuk menjadi landasan *nation building* yang mampu menampung seluruh harapan dan keinginan masyarakat Australia.

3.2.1 Kebijakan Multikultural Pada Masa Pemerintahan PM. Bob Hawke

Perdana Menteri Bob Hawke adalah Perdana Menteri Australia yang berasal dari partai buruh dan memenangkan pemilu selama dua periode pemerintahan empat tahun pertama pemerintahan Perdana Menteri Hawke adalah tahun 1983-1987, pada masa empat tahun pertama ini tidak begitu banyak perkembangan berarti yang terjadi dalam multikulturalisme. Pada tanggal 26 April 1984, PM. Bob Hawke berpidato pada acara pembukaan markas baru *Federation of Ethnic Communities Council of Australia (FECCA)* di Sydney. Di sini PM. Bob Hawke banyak membahas mengenai masalah dana yang akan dialokasikan untuk melaksanakan multikulturalisme, disamping itu Bob Hawke juga menyatakan berbagai macam program.

PM. Bob Hawke membuat berbagai program diantaranya pemerintah memberikan prioritas yang istimewa kepada program-program yang berkaitan dengan para imigran dan etnis-etnis di Australia, selain pemberian program kesempatan kerja yang sama bagi seluruh imigran dan orang Australia Program Pendidikan juga menjadi sorotan Bob Hawke, program pendidikan ini difokuskan kepada pengajaran

⁴⁰ Sandra Jackson, Janji-janji Pahit untuk Aborigin, koran Tempo, Sabtu 27 Oktober 2001, hal:2.

bahasa Inggris kepada para imigran agar mereka dapat beradaptasi dengan lebih cepat di Australia, termasuk juga pengajaran bahasa Inggris di lingkungan kerja.

Program yang berkaitan dengan etnis diantaranya dengan membentuk acara-acara penyiaran khusus untuk etnis melalui televisi maupun radio yang disebut dengan *Special Broadcasting Service*. Pemerintah Australia di bawah PM. Bob Hawke akan mengalokasikan lebih dari 200.000 dollar Australia untuk dengan membuat berbagai program pendek di berbagai media untuk mempromosikan toleransi ras dan etnis di Australia⁴¹. Untuk mempromosikan etnis dan ras yang ada di Australia banyak muncul radio, maupun televisi etnis yang acaranya dengan bahasa-bahasa selain bahasa Inggris misalnya bahasa Italia, dan bahasa-bahasa negara Asia lainnya.

PM. Bob Hawke juga memfokuskan multikulturalisme kepada remaja-remaja Australia terutama di dalam masalah pendidikan, karena pemerintah juga banyak menghadapi permasalahan-permasalahan remaja seperti dalam hal pendidikan, pekerjaan, perumahan, pendapatan, obat-obatan terlarang. Program yang dibuat oleh Bob Hawke bagi para pemuda ini diantaranya, bahwa orang-orang muda mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan kesempatan di dalam hidupnya melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan sebanyak mungkin. Program pencegahan penggunaan obat-obatan terlarang secara nasional akan membantu para remaja Australia mendapatkan peran yang berarti di masyarakat. Mengenai masalah remaja ini telah dibentuk *Office of Youth Affairs* yang berada di bawah *Federation of Ethnic Community Councils of Australia*.

Pada tahun 1986 terjadi sedikit gangguan di dalam perkembangan multikultural itu, ketika terjadi pemotongan anggaran besar-besaran untuk untuk para imigran, anggaran ini sebenarnya untuk program bahasa Inggris. Program-program imigran lainnya juga mengalami pemotongan anggaran. Setahun berikutnya yaitu pada tahun 1987 pemerintah Hawke membentuk *Office of Multicultural Affairs*

⁴¹ Bob Hawke, Australia : A Multicultural Society, hal:320.

(OMA) atau Kantor Urusan Multikultural, yang berada di bawah departemen Perdana Menteri sendiri.

Masa pemerintahan Bob Hawke yang kedua adalah antara tahun 1987-1991. Bob Hawke pada tahun 1989 melakukan perubahan yang penting bagi perkembangan multikulturalisme di Australia, dalam pandangan Hawke terdapat satu lagi fokus dari pengertian multikulturalisme yakni perasaan kesatuan yang dicantumkan di dalam Agenda Nasional Australia yang diumumkan pada tahun 1989. Hal ini menunjukkan bahwa Hawke memasukkan multikulturalisme ke dalam Agenda Nasional Australia, sehingga menjadi titik tolak bagi pentingnya multikulturalisme sebagai kebijakan yang diadopsi secara menyeluruh oleh pemerintah Australia, Bob Hawke memasukkan unsur-unsur nasionalisme ke dalam multikulturalisme, hal ini penting sebagai pembentukan jati diri Australia.

Bob Hawke juga menekankan kepada pentingnya komitmen orang-orang Australia terhadap kemajuan Australia. Dalam multikulturalisme Bob Hawke penampilan luar seperti ras, warna kulit dan sebagainya bukanlah ukuran rasa nasionalisme seseorang terhadap Australia sebagai negaranya.

Pemerintahan Bob Hawke mendefinisikan kebijakan multikultural sebagai kebijakan pemerintah yang dibangun dan diadopsi sebagai kunci kebijakan sosial⁴². Diantaranya untuk mengenali dan mengembangkan keragaman kultural, etnis, bahasa, agama serta identitas masyarakat Australia. Kebijakan ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat Australia tanpa melihat latar belakang budaya mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, di dalam kehidupan politik mereka punya kesempatan untuk berpendapat di dalam pembuatan keputusan pemerintah yang berpengaruh di dalam kehidupan mereka. Semua orang Australia berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari pemerintah maupun hukum, bebas untuk mengekspresikan budaya, menjalankan

⁴² Bob Hawke, *A. Multicultural Micrososome dalam Australian Foreign Affairs and Record*, Canberra, July 1989, hal : 331.

ibadah serta mempergunakan bahasa tradisionalnya disamping berbahasa Inggris. Itu adalah beberapa definisi kebijakan multikultural pemerintahan Hawke.

Agenda nasional adalah agenda bagi seluruh orang Australia, agenda nasional ini akan mengingatkan kepada seluruh Australia pentingnya kontribusi yang telah diberikan oleh para imigran terhadap Australia, terhadap perkembangan budaya dan ekonomi Australia. Kebijakan multikultural masih perlu melakukan berbagai macam terobosan untuk mengatasi terdapatnya prasangka dan tidak adanya toleransi pada kelompok tertentu di masyarakat seperti di halte bis, box telpon kadang-kadang masih terdapat tulisan yang bernada kebencian dan cemooh kepada kelompok-kelompok tertentu. Tulisan-tulisan tersebut misalnya berupa kata-kata yang mengandung rasisme. PM. Bob Hawke menyatakan bahwa pemerintah Australia harus mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi tidak adanya toleransi di masyarakat.

Pemerintahan PM. Bob Hawke banyak mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan para imigran seperti pendidikan, sekolah, informasi, serta pelatihan bahasa. Pemerintah telah menyediakan dana sebesar lebih dari 23 juta dollar selama kurun waktu 3 tahun untuk pelaksanaan program pelatihan bahasa Inggris, pembentukan *Languages Institute of Australia*, dan menambah sumbangan dana bagi sekolah-sekolah etnis.

Bulan Juli tahun 1989 pemerintahan Bob Hawke mengeluarkan dana sebesar 89 juta dollar untuk melakukan langkah nyata dalam mendukung pelaksanaan kebijakan multikultural, hasilnya adalah:

- Memperluas jaringan televisi etnis
- Menghilangkan halangan latar belakang ras, etnis, dan sebagainya agar orang Australia dapat memaksimalkan potensinya
- Kampanye nasional untuk memperbaiki hubungan masyarakat.⁴³

⁴³ Bob Hawke, *Multicultural Australia: PM. Spells Out Policies*, Loc. cit.

Perbaikan dalam hubungan masyarakat akan membantu mewujudkan kehidupan yang harmonis, sebab keharmonisan merupakan dasar bagi kesuksesan pelaksanaan kebijakan multikultural.

Pemerintahan Hawke juga mengeluarkan dana ekstra sebesar 3 juta dollar untuk memastikan bahwa para imigran memperoleh akses yang sama di dalam masyarakat dan pelayanan kesehatan, serta pelayanan dalam bidang pendidikan bagi semua etnis di Australia. Pemerintahan Hawke melaksanakan program tenaga kerja serta pelatihan kerja bagi para imigran yang berasal dari negara yang tidak berbahasa Inggris sebanyak 1,6 juta lapangan kerja telah diciptakan sepanjang pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Bob Hawke. Penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak ini akan menampung para imigran yang ingin bekerja di Australia.

Media massa bagi Bob Hawke juga merupakan sarana untuk suksesnya pelaksanaan kebijakan multikultural. Radio-radio etnis atau yang disebut *SBS Radio* di danai oleh pemerintah untuk menyiarkan berita-berita yang profesional dan program informasi bagi masyarakat sedikitnya dengan 15 bahasa yang berbeda untuk melaksanakan program ini pemerintahan Hawke memberikan dana sebesar 3,4 juta dollar untuk periode selama tiga tahun. orang Australia baik orang Yunani, Italia, Vietnam, Turki maupun yang lainnya mulai saat ini dapat mendengarkan siaran radio dengan bahasa yang sama dalam percakapan sehari-hari mereka.

Pemerintahan Hawke akan terus berusaha menghilangkan unsur-unsur diskriminasi dan tidak adanya rasa toleransi dalam segala bentuknya, tetap berkeyakinan bahwa kebijakan multikultural merupakan cara yang tepat untuk menangani berkembangnya keragaman kultural yang ada di Australia, serta pemerintah akan selalu memperhatikan aspirasi dari seluruh masyarakat etnis di Australia. Bob Hawke mengajak seluruh orang Australia untuk bekerja sama membangun Australia menjadi bangsa yang adil, terbuka dengan rasa toleransi yang tinggi, agar Australia menjadi negara yang nyaman untuk semua warga negaranya.

Kaum Aborigin menginginkan hak istimewa sebagai *Indigenous People*, yang mana hal ini belum dapat terwujud melalui kebijakan multikultural, sehingga mereka beranggapan bahwa kebijakan ini belum mampu menampung aspirasi mereka sepenuhnya. Oleh karena itu kebijakan multikultural yang bisa dikatakan sukses dalam mewujudkan keharmonisan di Australia masih perlu melakukan perbaikan berkaitan dengan keberadaan *Indigenous People* mereka.





BAB V

KESIMPULAN

Pemerintah Australia memilih kebijakan multikultural sebagai kebijakan nasional dan landasan *nation building* Australia karena kebijakan ini mampu menciptakan kehidupan yang harmonis diantara keanekaragaman yang terdapat di Australia. Kebijakan multikultural telah membantu di dalam pembentukan identitas nasional Australia, karena kebijakan multikultural memunculkan rasa bangga pada diri orang-orang Australia bahwa mereka memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dapat menjadi kekuatan positif bagi pembangunan bangsa Australia dalam berbagai bidang.

Pemilihan kebijakan multikultural karena di dalam kebijakan ini tidak terdapat unsur-unsur diskriminatif dan rasisme seperti yang terdapat pada kebijakan sebelumnya seperti kebijakan Australia Putih dan konsep Asimilasi. Di dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain di duni, Australia tidak lagi dianggap sebagai negara yang kaku dan sedikit rasis, karena sejak diberlakukannya kebijakan multikultural Australia bersedia menerima semua ras yang ingin menjadi warga negara Australia.

Kebijakan multikultural di dalam negeri Australia telah menciptakan keharmonisan antar etnis yang terdapat di Australia, sehingga tindakan-tindakan diskriminatif telah banyak berkurang dan bahkan berangsur-angsur hilang. Keragaman di Australia membutuhkan manajemen yang baik, tanpa harus menghilangkan tradisi dan akar budaya yang dimiliki oleh masing-masing etnis dan hal tersebut dapat terlaksana melalui kebijakan multikultural.

Sebagai landasan *nation building* Australia kebijakan multikultural masih menghadapi masalah mendasar yang harus cepat diselesaikan apabila pemerintah Australia tetap menginginkan kebijakan multikultural menjadi landasan *nation building* yang kuat. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keberadaan *indigenous People* Australia yaitu kaum Aborigin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Chauvel, H. Richard, *Budaya dan Politik Australia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
-, *Suatu Masyarakat Tanpa Bangsa*, Yayasan Obor, Indonesia, Jakarta, 1992.
-, et.al. *Kami Lapar Akan Tanah Kami*, Yayasan Obor, Indonesia, Jakarta, 1992.
- Head. W. Brian dan Allan Patience (eds), *From Fraser To Hawke*, Longman Cheshire, Melbourne, Australia, 1989.
- Horne, Donald, *The Lucky Country Australia in The Sixties*, Penguin Books, Victoria, 1964.
- Hardjono, Ratih, *Suku Putihnya Asia – Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Hamid, Zulkifli, *Sistim Politik Australia*, Laboratorium Ilmu Politik UI dan PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Hoeve, Van, *Ensiklopedi Indonesia (edisi khusus) Australia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.
- Menzeis, Sir Robert Gorden, *Australia Sebuah Pengantar Negara dan Bangsa: Australia*, Grolier International Inc diedarkan oleh PT. Widyadara, Jakarta, 1988.
- Mas'oed, Moechtar, *Ilmu Hubungan Internasional-Diplin dan Metodologi*, LP3S. Jakarta, 1990.
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1979.

Laporan Penelitian:

- Patriadi, Himawan Bayu, *Pembangunan Identitas Politik-Studi Kasus Australia*, Universitas Jember, Jember, 1998.



Jurnal:

- Broinowski, Alison. 1989. *Asian Perceptions of Australia*. *Australia Foreign Affairs and Trade*, 60 (1): 96-299.
- Castello, Michael. 1998. *Racial Discrimination and Self Determination*. *Australian Foreign Affairs Record*, 59 (10): 425-426.
- Dalrymple, Mr. Rawdon. *Is Australia A Part of Asia*. *Australia Foreign Affairs Record*, 9 (10): 718.
- Hawke, Bob. 1984. *Australia: A Multicultural Society*. *Australian Foreign Affairs Record*, 55 (4) : 316-321.
- 1987. *Multiculturalism in Australia*. *Australian Foreign Affairs Record*, 58 (2) : 49.
- 1989. *Multicultural Microsism*. *Australian Foreign Affairs dan Trade*, 9 (7): 330-331.
-1990. *Multicultural Australia: P.M. Spells out Policies*. *Australian Foreign Affairs dan Trade*, (3) : 156-159.
- Penman, Dr. David. 1985. *Richness in Diversity*. *Australian Foreign Affairs Record*, 56 (7): 1168-1172.

Surat Kabar:

- Kompas, 14 September 2000.
- Tempo, 27 Oktober 2001
- Time, 8 Februari 1988

Majalah:

- Gatra, 4 Maret 2000.

Internet:

- www.dfat.gov.au/aib2000/part-2/b/html
- www.ourcivilization.com/cooray/multicult-igk
- www.global.hi.net/laostudy/multicom.htm

http://www.unisa.edu.au/hawke_speeches/nation.htm

www.acta.edu.au/forward.htm

www.geocities.com/martabb-au/multiculturalism.html

<http://www.apf.gov.au/htm>

